

**INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM SEKTOR
PENDIDIKAN (STUDI KASUS IMPLEMENTASI SISTEM
KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN (SKTB) DI MTs.
MUHAMMADIYAH LEMPANGANG)
KABUPATEN GOWA**

**DEWI SARTIKA
105640189414**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM SEKTOR
PENDIDIKAN (STUDI KASUS IMPLEMENTASI SISTEM
KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN SKTB DI MTs.
MUHAMMADIYAH LEMPANGANG) KAB. GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan.

Disusun dan Diajukan Oleh

Dewi Sartika

Nomor Stambuk : 105640189414

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Sektor Pendidikan (Studi Kasus Implementasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan SKTB) Di MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa

Nama Mahasiswa : Dewi Sartika

Nomor Stambuk : 105640 189414

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Alimuddin Said, M.Pd

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fisipol Unismuh Makassar

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1200/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 10 bulan 10 tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Dr. Burhannuddin, S.Sos, M. Si

Penguji :

1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd (.....)
2. Dra. Hj. St Nurmaeta, MM (.....)
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si (.....)
4. Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Dewi Sartika

Nomor Stambuk : 105640189414

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 10 Oktober 2018

Yang Menyatakan

Dewi Sartika

ABSTRAK

DEWI SARTIKA 2014, Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Sektor Pendidikan (Studi Kasus Implementasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan SKTB Di MTs. Muhammadiyah Lempangang) Kab. Gowa (Di Bimbing Oleh Drs. Alimuddin Said M.Pd, dan Dr. Nuryanti Mustari S.IP. M.Si)

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Inovasi Pemerintah dalam Sektor Pendidikan Implementasi Faktor Penghambat dan Pendukung Yang Berpengaruh Terhadap sistem kelas tuntas berkelanjutan Di MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa? Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui Inovasi Pemerintah dalam Sektor Pendidikan Implementasi Faktor Penghambat dan Pendukung Yang Berpengaruh Terhadap sistem kelas tuntas berkelanjutan Di MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian Studi Kasus. Informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara mendalam dengan informan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) saat ini belum berjalan secara optimal masih dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama masih adanya pemahaman yang bervariasi mengenai kebijakan ini Sarana dan prasarana pembelajaran model Pembelajaran dan model manajemen sekolah. Peran pemerintah dalam SKTB yaitu mensosialisasikan kebijakan ini, melaksanakan workshop, dan pelatihan juga masih perlu ditingkatkan apalagi kegiatan pembimbingan kepada guru berkaitan pelaksanaan teknis. Faktor Pendukung Bahwa muhammadiyah itu sudah memiliki kesepakatan dengan pemerintah kabupaten Gowa kalau seluruh perguruan dibawah naungan muhammadiyah itu mengikuti sistem pendidikan yang di berlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa di antaranya adalah Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB), Semua Stakholder Pendidikan Sudah merespon dengan baik. Faktor Penghambat yakni Pemahaman Masyarakat yang keliru tentang SKTB, Perangkat pendukung dari sistem yang tidak maksimal, Keterbatasan pendanaan.

Kata Kunci: Inovasi Pemerintah, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan SKTB

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Sektor Pendidikan Studi Kasus Implementasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di MTs.Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada terhormat kepada Orang tua tercinta, Ayahanda Sulaeman dan Ibunda tercinta Nurhayati yang telah rela berkorban tanpa pamrih dalam membesarkan, mendidik serta mendoakan keberhasilan penulis, yang tiada hentinya memberi dukungan disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas.

Drs. Alimuddin Said M.Pd selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik,S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos.,M.Si selaku Wakil Dekan I dan Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.Segenap Dosen dan seluruh jajaran Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan di mulai dari semester awal hingga semester akhir. Saudara-saudara seperjuangan yang selalumemberikan semangat dan do'a membantu peneliti sehingga semua proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar dan letting Ilmu Pemerintahan 2014, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMJIP), Teman seperjuangan Posko KKP Lassang Barat Kab. Takalar, The Pingkers dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih banyak dan semangat untuk berjuang mencapai Toga.

Pihak Sekolah MTs.Muhammadiyah Lempangang yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian.Teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih karena selalu mendukung dan member motivasi dalam proses penyelesaian skripsi. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 24September 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep dan Teori	11
1. Inovasi	11
2. Inovasi Pemerintah Daerah	14
3. Pengertian Inovasi Pendidikan	18
4. Pengertian Pemerintah	30
5. Konsep Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan	33

B. Kerangka Pikir	38
C. Fokus Penelitian	39
D. Deskriptif Fokus penelitian	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
B. Tipe dan Jenis Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	44
D. Informan Penelitian.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Teknik Keabsahan Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	50
1. Gambaran Umum MTs.Muhammadiyah Lempangang.....	50
2. Visi dan Visi MTs. Muhammadiyah Lempangang	50
3. Tujuan MTs.Muhammadiyah Lempangang	51
4. Struktur Organisasi MTs.Muhammadiyah Lempangang	51
5. Tugas Pokok MTs. Muhammadiyah Lempangang.....	53
B. Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Sektor Pendidikan	

(Studi Kasus Implementasi SKTB Di MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa.....	56
C. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)	80
1. Faktor Pendukung Pelaksanaan (SKTB) Di MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa	81
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan (SKTB) Di MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa	83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Peneliti.....	4
5	
Tabel 4.1 Jumlah Siswa dan Jumlah Kelas Rombel.....	7
2	
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana MTs. Muhammadiyah Lempangang.....	7
3	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dapat melakukan Peranan yang sangat penting pada suatu proses peningkatan dan kualitas sumber daya manusia yang merupakan suatu proses yang dapat menyatu dengan pengembangan kualitas itu sendiri. Proses peningkatan sumber daya manusia pemerintah telah berupaya menciptakan amanat tersebut dengan melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang berkuaitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi. Perbaikan sarana pendidikan, dengan Perkembangan dan pengadaan materi Pengajaran serta pelatihan bagi guru dengan tenaga kependidikan lainnya. tetapi kenyataan belum cukup dalam meningkatkan kualitas pada pedidikan (Mustakim dkk, 2013).

Sementara itu UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Menegaskan bahwa pendidikan Nasional dapat berfungsi mengembangkan kebiasaan dan membentuk watak serta dengan peradaban bangsa yang bermartabat pada rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya suatu potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang maha Esa dan berakhlak mulia, berilmu, cakep, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Ekosiswoyo, 2012).

Politik dan kekuasaan pada suatu Negara dapat memegang kunci keberhasilan pendidikan pada konteks pembangunan demokratisasi dan sentralisasi yang ada di Indonesia (Sarnoto, 2012). Khusus di Indonesia isu sentral dalam bidang pendidikan adalah masalah rendahnya suatu mutu pendidikan sehingga penyelesaian pada masalah pendidikan sangat dapat memerlukan keterlibatan pemerintah yang notabeneanya merupakan bagian dari politik dan kekuasaan (Mustari, 2011).

Merespon permasalahan tersebut, kabinet telah mengeluarkan suatu paket reformasi pendidikan menyeluruh yang dirancang untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. Komponen utama dimana proses reformasi tersebut adalah perlimpahan tanggung jawab pada pendidikan dasar di sekolah-sekolah dan pemerintah daerah. Dengan dikeluarkannya paket reformasi pendidikan, dimana perlimpahan tanggung jawab pada pendidikan dasar yaitu pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah Pertama, sekolah menengah Atas dan sekolah menengah kejuruan yang diberikan kepada sekolah dan pemerintah daerah yang merupakan penegasan pemerintah pusat atas upaya pemerataan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas anak didik di seluruh Indonesia (Al-Samarrai, 2013).

Pemerintah Daerah yang senantiasa bersinergi dengan sekolah dituntut menghadirkan kebijakan inovatif, kreatif dan implementatif dalam mewujudkan tujuan paket reformasi pendidikan. Sudah seharusnya pemerintah tidak lagi berada pada wilayah abu-abu, melaksanakan kegiatan pendidikan hanya sebatas tugas normatif, akan tetapi sudah perlu mewujudkan proses

kegiatan pendidikan yang berbobot dengan tujuan pelaksanaan pendidikan. Salah satu tujuan wajib pemerintah daerah yaitu dalam pendidikan, hal ini sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan pembangunan suatu daerah. Melalui sektor pendidikan ini daerah bisa berkembang, maju, kompetitif, dan sejahtera ketika dapat membuat sebuah kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Kebijakan pendidikan dapat dijadikan skala prioritas dalam pembangunan suatu daerah yang nantinya akan mampu mencetak SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas mampu membawa daerahnya ke era persaingan baik itu dalam taraf nasional maupun Global.

Perkembangan suatu ekonomi yang digerakkan pada ilmu pengetahuan secara teknis disebut *Knowledge driven economic growth*. Pada konsep ini dapat menempatkan lembaga pendidikan pada posisi yang strategis sebab dapat (1) melahirkan tenaga-tenaga kerja yang terlatih, kompetitif dan adaptif seperti professional pakar, teknis dan manajer.(2) melahirkan ilmu pengetahuan baru yang dapat menciptakan inovasi yang berbasis teknologi.(3) meningkatkan kemampuan dalam mengakses perkembangan ilmu pengetahuan pada level global untuk mengadaptasinya menurut konteks local. Maka sangat pentinglah sebuah inovasi kebijakan pendidikan dalam suatu daerah menghadapi perkembangan zaman di era globalisasi ini (Muhammad Ali, 2009).

Saat ini, Kabupaten Gowa telah mengeluarkan kebijakan dalam bidang pendidikan, salah satu kebijakan program pendidikan Ichsani Yasin Limpo melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diterapkan di

Kabupaten Gowa adalah SKTB merupakan singkatan dari Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (*AutomaticPromotion*), SKTB disosialisasikan pada tahun 2011 dimana pelaksanaanya pada tahun 2012 dan pada 2013 dilaksanakan secara keseluruhan disemua tingkatan sekolah SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Gowa. Sebagai langkah awal, SKTB dijalankan di beberapa sekolah percontohan tepatnya 50 sekolah untuk tingkatan SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Gowa (Silfitriana, 2016).

Kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan untuk memajukan kualitas pendidikan dan memenuhi hak masyarakat dalam pelayanan pendidikan yang berkualitas. Sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) adalah sebuah kebijakan yang ditempuh pada Pemerintah Daerah kabupaten Gowa Sulawesi-selatan yang menekankan pada pelayanan pendidikan secara komprehensif dan tuntas anak didik, sebagai subjek dalam belajar. Memberikan pengalaman belajar yang mampu mengembangkan pada potensi peserta didik secara maksimal, khusus Peserta didik di kabupaten gowa (Breaking Newsgowa 2017).

Kebijakan tersebut di tempuh karena Pemerintah daerah Kabupaten Gowa menyadari bahwa sistem pendidikan, terutama pendidikan dasar adalah pondasi dari semua jenjang pendidikan yang ada, yang tersebar dari kota hingga pelosok desa terpencil seharusnya memiliki kekuatan dalam mengembangkan kemampuan diri pada peserta didik untuk hidup sebagai anggota masyarakat produktif. Juga disadari bahwa pendidikan dasar merupakan kekuatan yang dapat mengantarkan peserta didik pada jenjang

pendidikan selanjutnya dan mengembangkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya (Silfitriana, 2016).

Sistem kelas tuntas berkelanjutan adalah kebijakan program pendidikan yang berupaya memberi pelayanan yang optimal pada peserta didik melalui strategi penuntasan semua tagihan setiap mata pelajaran secara berkelanjutan. Sistem kelas tuntas berkelanjutan berfungsi mengembangkan suatu kemampuan dan membentuk watak serta peradaban pada bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan yang ingin dicapai dalam sistem kelas tuntas berkelanjutan adalah memberi pelayanan pendidikan secara maksimal pada peserta didik, agar dapat belajar secara optimal dalam menuntaskan semua tagihan pada Kompetensi Dasar seluruh mata pelajaran dalam setiap satuan pendidikan untuk membantu memfasilitasi pengembangan potensi siswa secara utuh (kecerdasan spiritual, emosional, intelektual dan kecerdasan kinestetik) dan dipertegas dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 yang memposisikan kebijakan pada sistem kelas tuntas berkelanjutan sebagai program Pemerintah Kabupaten Gowa yang Khas, unik dan Unggul. Kebijakan ini menuntut efisiensi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan menghindari hal-hal yang dianggap tidak substantif untuk dilaksanakan Efisiensi dan efektifitas sangat berkaitan erat.

Keunggulan sistem kelas tuntas berkelanjutan yaitu peserta didik belajar selalu dalam kondisi psikologis yang positif, percaya diri, Jujur dan mampu mengembangkan pada kreatifitas karena nasib mereka tidak menutup

kemungkinan ditentukan oleh ujian nasional dan tes yang dapat mengukur kemampuan yang sesaat dan setiap peserta didik terjamin bisa mendapatkan haknya memperoleh pendidikan dasar 9 tahun , selain itu peserta didik dapat lebih cepat menyelesaikan sistem kredit semester sehingga biaya yang dikeluarkan orang tua untuk keperluan pribadi bisa lebih hemat. Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan sebuah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang menekankan Pada pelayanan pendidikan berkualitas dan Komprehensif kepada peserta didik yang memposisikan dirinya sebagai subjek dalam belajar sehingga mampu mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Masalah Sistem kelas tuntas berkelanjutan di sekolah SD dan SMP dan Satu-satunya Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang menerapkan kebijakan sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) dalam Pelayanan Pendidikan yaitu hanya berlaku di Kabupaten Gowa. Pada pelaksanaannya kebijakan ini masih belum berjalan secara optimal masih terdapat kekeliruan berkaitan dengan pemahaman mengenai kebijakan ini dimana siswa tidak mengenal lagi adanya tinggal kelas, dan masih ada beberapa guru yang belum paham dengan teknisnya Dampak dari adanya kebijakan ini, Guru member pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik dalam suasana pendidikan yang kondusif sehingga peserta didik dapat belajar secara optimal dalam menuntaskan pencapaian kompetensi pada seluruh mata pelajaran di setiap kurikulum. sedangkan dari dampak negatifnya kebijakan ini membuat beberapa siswa tidak serius dalam belajar karena merasa kebijakan ini

menguntungkan bagi mereka yaitu mereka tidak harus tinggal kelas karena ada jaminan untuk naik kelas.

Penerapan kebijakan Sistem Kelas Tuntas berkelanjutan di Kabupaten Gowa tak lagi mengenal istilah tinggal kelas dengan adanya penerapan kebijakan ini siswa diharapkan mampu untuk menyelesaikan setiap kurikulum dalam mata pelajaran. Apabilah siswa tidak menyelesaikan setiap kurikulum dalam mata pelajaran. Atau tidak menyelesaikan satu atau lebih kurikulum pada setiap jenjang, maka siswa tetap berkelanjutan untuk naik kelas ke tingkat berikutnya karena tidak adanya lagi sistem tinggal kelas. oleh karena itu siswa dinilai dari beberapa banyak kurikulum yang diselesaikan di setiap jenjangnya tanpa adanya sistem naik atau tinggal kelas. sedangkan Sekolah Umum siswa yang tinggal kelas mengulang semua mata pelajaran, padahal siswa tersebut hanya tidak tuntas pada satu atau beberapa mata pelajaran(Fadly dkk 2017).

Adapun perbandingan penelitian yang telah dilakukan oleh (Mety 2016) Terkait dengan Evaluasi kebijakan Sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa Pelaksanaan pada kebijakan SKTB telah dilakukan pada semua tingkatan sekolah baik SD, SMP dan SMA. Pada pelaksanaan Kebijakan ini masih belum berjalan secara optimal dan masih terdapat kekeliruan yang berkaitan dengan pemahaman mengenai kebijakan ini dimana pada peserta didik tidak mengenal lagi adanya sistem tinggal kelas, selain itu masih terdapat beberapa Guru yang belum dapat memahami mengenai pelaksanaan teknisnya di lapangan. Dampak dari adanya kebijakan ini,

guru dituntut semakin memberikan perhatian yang lebih terhadap siswanya, sedangkan dari dampak negatifnya kebijakan ini dapat membuat beberapa siswa tidak serius dalam melakukan proses belajar karena menguntungkan mereka tidak harus tinggal kelas.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh (Mulyani 2015) terkait dengan Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di SD Inpres Cambaya adalah sebuah inovasi dalam dunia pendidikan yang dilahirkan dan dilaksanakan pada Kabupaten Gowa. Telah dituangkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang SKTB. Program ini memposisikan siswa sebagai subjek dalam proses pembelajaran, sehingga siswa mengenali apa yang kurang dalam dirinya. Dengan hadirnya inovasi dalam dunia pendidikan, Oleh karena itu, Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa inovasi pendidikan pelaksanaan SKTB yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran ini.

Dengan demikian maka Peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang ada di kabupaten gowa sehingga muncul judul sebagai berikut: **“Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Sektor Pendidikan (Studi Kasus Implementasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di MTs. Muhammadiyah Lempangang)”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah seperti yang di uraikan, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Inovasi Pemerintah dalam Sektor Pendidikan Implementasi sistem kelas tuntas berkelanjutan Di MTs. Muhammadiyah Lempangang?
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Yang Berpengaruh Terhadap sistem kelas tuntas berkelanjutan Di MTs. Muhammadiyah Lempangang?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Inovasi Pemerintah dalam Sektor Pendidikan Implementasi sistem kelas tuntas berkelanjutan Di MTs. Muhammadiyah Lempangang!
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung Yang Berpengaruh Terhadap Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan Di MTs. Muhammadiyah Lempangang!

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan, karena akan menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang Bagaimana Inovasi Pemerintah Daerah dalam Sektor Pendidikan (Studi Kasus Implementasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di MTs. Muhammadiyah Lempangang.

2. Manfaat Praktis

Berguna untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal mempelajari tentang bagaimana Inovasi Pemerintah Daerah dalam Sektor Pendidikan (Studi Kasus Implementasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di MTs. Muhammadiyah Lempangang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Teori

1. Inovasi

Konsep Inovasi sendiri sebenarnya juga merupakan istilah yang relatif baru apabila diukur pada perjalanan sejarah peradaban manusia. Istilah ini berasal dari bahasa latin *innovare* yang berarti berubah sesuatu yang menjadi baru. Istilah inovasi (*innovation* dan *innovate*) sendiri baru mulai dikenal dalam kosakata bahasa Inggris pada abad ke-16. Hanya saja pada masa itu, istilah inovasi lebih banyak diasosiasikan secara negatif sebagai *troublemaker* serta lebih identik dengan nuansa revolusi atau perubahan radikal yang membawa dampak yang sangat luar biasa, terutama terhadap keamanan sosial politik serta dianggap mengancam struktur kekuasaan. Sehingga rejim kekuasaan dan politik, serta otoritas keagamaan pada masa itu cenderung menolak segala hal yang berbau inovasi. Adapun istilah *innovative* sendiri mulai luas dipergunakan banyak orang sejak abad ke-17, atau sekitar 100 tahun kemudian (Suyono, 2015:8).

Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Suryani (2008:62), Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Namun demikian, dalam konteks

pemasaran dan konteks perilaku konsumen inovasi dikaitkan dengan produk atau jasa yang sifatnya baru. Baru untuk merujuk pada produk yang memang benar-benar belum pernah ada sebelumnya di pasar dan baru dalam arti ada hal yang berbeda yang merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah ditemui konsumen di pasar.

Pengertian Inovasi menurut Kusmana (2010:54), Inovasi adalah suatu hasil penciptaan sesuatu yang dianggap baru yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah, baik berupa ide, barang, kejadian, metode dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sebuah ide, gagasan, atau pun teori hanya bisa digolongkan ke dalam sebuah inovasi jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Khas, Ciri utama dari sebuah inovasi adalah khas. Inovasi harus memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki atau pun ada pada ide atau pun gagasan yang sudah ada sebelumnya. Tanpa ciri khas yang spesifik, sebuah ide atau pun gagasan tidak dapat digolongkan menjadi sebuah inovasi baru,
2. Baru, Ciri ke dua dari sebuah inovasi adalah baru. Setiap inovasi haruslah merupakan ide atau pun gagasan baru yang memang belum pernah diungkapkan atau pun dipublikasikan sebelumnya,
3. Terencana, Ciri ketiga dari sebuah inovasi adalah terencana. Sebuah inovasi biasanya sengaja dibuat dan direncanakan untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Dengan kata lain, setiap inovasi yang ditemukan pada dasarnya merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal.

4. Memiliki Tujuan, Ciri terakhir yang harus ada pada inovasi adalah memiliki tujuan. Seperti yang telah dijelaskan di poin yang sebelumnya, inovasi merupakan aktivitas terencana untuk mengembangkan objek-objek tertentu (tujuannya adalah mengembangkan objek – objek tertentu).

Inovasi adalah suatu Penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya orang atau wirausahawan yang selalu berinovasi, maka ia dapat dikatakan sebagai seorang wirausahwan yang inovatif (Drucker dalam Sulistiawati 2016:9). Ada Beberapa Jenis-jenis inovasi Suyono, (2015:17) antara lain yaitu :

- a. Inovasi institutional, adalah pembaruan lembaga yang telah berdiri atau pendirian institusi baru. Pembaharuan lembaga ini membutuhkan analisis dan kajian yang mendalam tentang keberadaan satu lembaga disektor publik. Lembaga yang dirasa tidak cukup efektif dan tidak memberikan kontribusi riil dalam penyelenggaraan publik perlu dilakukan perombakan atau dihilangkan agar tidak membebani anggaran publik.
- b. Inovasi organisasional, termasuk introduksi prosedur pekerjaan atau teknik manajemen baru dalam administrasi publik. Upaya menemukan metode dan mekanisme dalam penyelenggaraan publik sangat diperlukan, terutama metode-metode baru dalam aspek pengembangan kompetensi individu dan penerapan teknologi baru.
- c. Inovasi proses adalah pengembangan kualitas pemberian pelayanan publik
Proses pemberian layanan membutuhkan sentuhan-sentuhan inovasi

terutama dalam hal *service delivery*, efisiensi layanan dan kemudahan akses layanan.

- d. Inovasi konseptual adalah bentuk-bentuk baru governance (seperti: pembuatan kebijakan yang interaktif, keterlibatan governance, reformasi penganggaran berbasis masyarakat dan jaringan horizontal).

2. Inovasi Pemerintah Daerah

Inovasi pemerintah merupakan suatu hal yang penting dalam mencapai keunggulan kompetitif. Tanpa inovasi pemerintah tidak dapat merubah suatu hal dan apabila inovasi tidaklah muncul maka perubahan akan mati. perusahaan yang melakukan inovasi secara terus-menerus akan dapat mendominasi pasar, dengan kreasi model dan Penampilan Produk yang baru (Sulistiawati, 2016:10).

Menurut Fontana, (2011:18) Aspek pokok inovasi Pemerintah yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Efektifitas, adalah perubahan yang dinilai secara objektif dan berbagai kepentingan dalam organisasi atau perubahan dalam suatu wilayah yang ditemukan.
- b. Pembaruan, inovasi menghasilkan suatu yang baru.
- c. Tingkat perubahan, perubahan yang dapat dihasilkan.

Selain itu Fontana, (2011:18) juga mengatakan bahwa , inovasi pemerintah yang berhasil adalah inovasi yang menciptakan nilai besar untuk konsumen, komunitas dan lingkungan pada saat yang sama.

Inovasi pemerintah daerah guna untuk mengimplementasikan dari pelaksanaan desentralisasi yaitu mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat atau mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat dan daerahnya inovasi program yang terbukti mampu membawa kemajuan bagi sebuah daerah yang sebelumnya terbelakang menjadi daerah yang maju secara ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, inovasi adalah merupakan proses yang dimulai dengan keinginan untuk menjadi lebih baik inovasi sangat terkait dengan penemuan dimana secara umum inovasi muncul dari sebuah proses dan dari sebuah perencanaan besar (Tahir,2017:13).

Selain itu Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Di Indonesia penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung berjalan di tempat, sedangkan implikasinya sebagaimana diketahui sangat luas karena menyentuh seluruh ruang-ruang kepublikan baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain (Mahsyar dalam Tahir 2011:14).

Khusus tentang inovasi telah ada landasan hukumnya dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bertajuk Inovasi Daerah Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014. Inovasi yang dimaksud dalam Pasal 386 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Bentuk pembaharuan antara lain penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan inovasi daerah mengacu pada prinsip : (1) peningkatan efisiensi; (2) perbaikan

efektivitas; (3) perbaikan kualitas pelayanan; (4) tidak ada konflik kepentingan; (5) berorientasi kepada kepentingan umum; (6) dilakukan secara terbuka; (7) memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan (8) dapat dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan dirisendiri (Tahir 2017:15).

Zuhriyati dkk (2012:48) inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusi - institusi berbeda yang berkontribusi, secara bersama maupun individu, dalam pengembangan dan difusi teknologi - teknologi baru dan menyediakan kerangka kerja (*framework*) di mana pemerintah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi proses inovasi. Dengan demikian, sistem inovasi merupakan suatu sistem dari lembaga – lembaga yang saling berkaitan untuk menciptakan, menyimpan, dan mengalihkan (mentransfer) pengetahuan, keterampilan yang menentukan teknologi baru. Inovasi tidak akan bisa berkembang dalam kondisi status quo.

Inovasi mempunyai satu sifat mendasar yaitu sifat kebaruan. Sifat kebaruan ini merupakan ciri dasar inovasi dalam menggantikan pengetahuan, cara, objek, teknologi atau penemuan yang lama, yang sudah tidak efektif dalam menyelesaikan suatu masalah walaupun tidak ada satu kesepahaman definisi mengenai inovasi, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa inovasi mempunyai atribut yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai pelaksanaan inovasi atau mengukur pelaksanaan Inovasi (Rogers dalam Suparno, 2017:5) yaitu :

- a. *Relative advantage* atau keuntungan Relatif, sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi

sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri membedakan dengan yang lain.

- b. *Compatibility* atau kesesuaian inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau sesuai dengan inovasi yang digantikannya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.
- c. *Complexity* atau kerumitan dengan sifatnya yang baru maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.
- d. *Triability* atau kemungkinan dicoba, inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji coba”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk memuji kualitas sebuah inovasi.
- e. *Observability* atau kemudahan diamati sebuah inovasi harus juga dapat diamati dari segi bagaimana ia berkerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Sedangkan Strategi Inovasi dalam Pemerintahan Menurut Sangkala (2013:38) yaitu:

- a. Layanan terintegrasi, dimana sektor publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan yang tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan.
- b. Desentralisasi pemberian dan monitoring layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis.
- c. Pemanfaatan Kerjasama, bermakna sebagai pemerintahan yang inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga terjadi kerjasama antara publik dan swasta.
- d. Pelibatan Warga Negara. Kewenangan pemerintah yang inovatif harus merealisasikan peran-peran pentingnya dengan mendorong peran warga untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan.
- e. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan Informasi.

3. Pengertian Inovasi Pendidikan

Kata *innovation* dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan segala hal yang baru atau pembaharuan. Hamijoyo (2010:34). Untuk memahami lebih dalam lagi mengenai pengertian inovasi pendidikan perlu diketahui juga tentang pengertian *discovery* dan *invention* yang dalam bahasa Indonesia kata tersebut mengandung arti ditemukannya sesuatu hal yang baru, baik hal

tersebut pada konsepnya sudah ada pada waktu lampau namun baru ditemukan kembali atau bahkan memang hal-hal yang baru ditemukan.

Inovasi Pendidikan menurut Ibrahim (2009:27) mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil intervensi (penemuan baru) atau discovery (baru ditemukan orang), yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional.

Inovasi pendidikan merupakan upaya dalam memperbaiki aspek-aspek pendidikan dalam praktiknya. Untuk lebih jelasnya inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru, dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada sebelumnya), serta dengan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal dalam pendidikan (Sa'ud 2011:5).

Inovasi Pendidikan Merupakan faktor penting bagi kemajuan pendidikan tidak berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan bahkan terkesan terlatih-latih tampaknya berada pada level kelas. dan upaya yang melakukan pembaharuan pendidikan harus berawal pada level kelas (Zakso Amrazi 2010:10). Sementara substansi dari kebijakan pemerintah adalah membuat/melakukan pengambilan keputusan untuk kemudian melakukan tindakan oleh pemerintah secara bersama – sama dengan pihak rakyat yang dikuasi dan diatur dan atau secara sepihak oleh pemerintah terhadap rakyat.

Secara Umum Inovasi Pendidikan dapat dimaknai sebagai pembaharuan dalam bidang pendidikan. Inovasi pendidikan melingkupi segala sesuatu kebaruan yang mampu membawa lembaga pendidikan menjadi lebih bermutu dalam penyelenggaraan proses pendidikan atau pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, yang tercermin dari *output* lulusan yang berprestasi, maupun *outcome* yang bermanfaat bagi masyarakat(Uhar 2016:303).

Upaya-upaya inovatif melalui kebijakan pendidikan berbasis kepada masyarakat di satu sisi, dan kebijakan pendidikan berfokus pada pelanggan dan mutu, akan dapat menciptakan daya saing anak bangsa dalam persaingan global. Dengan demikian inovasi pendidikan memang menjadi keniscayaan dalam merespon tuntutan lingkungan internal dan respon terhadap keperluan eksternal dunia pendidikan nasional, sehingga system pendidikan nasional yang dilaksanakan mampu menciptakan tatanan budaya baru bangsa yang lebih cerdas dan mensejahterakan dan memajukan bangsa (Mesiono.2012:62).

Secara keseluruhan ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam komponen sistem social untuk melakukan inovasi pendidikan, yaitu:

1. Pembinaan personalia, inovasi ditentukan personil pendidikan, karena itu perlu peningkatan mutu guru, sistem kenaikan pangkat, aturan tata tertib siswa dan sebagainya.
2. Banyaknya personil dan wilayah kerja, inovasi pendidikan harus memperhatikan keseimbangan personil pendidik, tenaga administrasi dengan siswa yang ditangani untuk di didik dengan baik;Fasilitas Fisik, inovasi

3. pendidikan harus memperhatikan kesesuaian fasilitas fisik dengan jumlah siswa dan perkembangan teknologi; Penggunaan waktu, inovasi pendidikan
4. memperhatikan ketepatan perencanaan penggunaan waktu dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
5. Perumusan Tujuan, inovasi pendidikan harus memperhatikan semua hirarki tujuan pendidikan dengan perubahan zaman yang terjadi.
6. Prosedur, inovasi pendidikan perlu memperhatikan penggunaan kurikulum baru, cara membuat persiapan mengajar, pengajaran individu dan kelompok dan sebagainya.
7. Peran yang diperlukan, inovasi pendidikan perlu memperhatikan kejelasan peran dari setiap orang dalam melaksanakan pendidikan yang diharapkan.
8. Wawasan dan perasaan, inovasi pendidikan yang relevan harus memperhatikan kesamaan wawasan dan perasaan dalam melakukan inovasi pendidikan yang diharapkan efektif.
9. Bentuk hubungan antar bagian (mekanisme kerja), inovasi pendidikan yang relevan harus memperhatikan mekanisme kerja yang baik jangan sampai program inovasi menjadi terhambat hanya karena tidak memahami mekanisme kerja.
10. Hubungan dengan system yang lain. inovasi yang relevan adalah harus memperhatikan hubungan antara satu sistem dengan sistem lain; atau hubungan antara subsistem dalam satu sistem. Karena masing-masing sistem memiliki fungsi, dan berhubungan dengan system lain untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan.

11. Strategi. Sebagai instrument atau alat (biasanya meliputi rangkaian aktivitas yang bersifat spesifik) yang dapat mengantarkan inovasi mencapai tujuannya. Karena inovasi menyangkut unsur- unsure atau elemen yang kompleks dan variatif, maka strategi implementasinya pun berbeda-beda sesuai dengan kompleksitas dan variasi dalam paket inovasi tersebut. karenanya, harus diakui bahwa pola strategi inovasi pendidikan memang sulit untuk diklasifikasikan (Miles 2011:18-19).

Demikian pula, secara kronologis, seorang innovator bisa mempertimbangkan serangkaian tahapan atau langkah-langkah sebelum sebuah inovasi di adopsi. Sa'ud mengemukakan pendapat Miles (2011:11), tentang tahapan atau langkah-langkah strategi inovasi pendidikan adalah:

1. Desain inovasi, baik merupakan hasil invensi maupun diskoveri, penyebarannya harus berdasarkan penelitian dan pengembangan (*research and development*). Karena itu, desain inovasi pendidikan yang tidak di dasarkan atas hasil *research and development* takan cenderung mengalami kegagalan dalam implementasi.
2. Kesadaran dan perhatian sasaran inovasi, para anggota target sistem perlu memiliki perhatian dan kesadaran akan pentingnya inovasi dan mencari berbagai informasi yang dibutuhkan untuk itu. dalam kontek sini, para innovator atau *innovatoragent's* perlu memunculkan dan membangkit akan kesadaran pada diri sasaran atau anggota target system bahwa inovasi yang dirancang dan yang akan dilaksanakan sangat mereka butuhkan untuk mengantarkan mereka pada kondisi atau keadaan yang lebih baik.

3. Evaluasi, para sasaran inovasi harus diberi peluang dan kesempatan yang luas untuk memberikan penilaian tentang inovasi dan memberikan pandangannya, baik pro maupun kontra, tentang kemampuan inovasi tersebut dalam mencapai tujuan- tujuan sistem, sesuai dengan kondisi, upaya yang telah dilakukan, pembiayaan, dan sebagainya.
4. Uji Coba, inovasi yang akan dilaksanakan perlu diuji coba dalam skala kecil untuk membuktikan hasil dan berbagai konsekuensi- nya. Jika hasil uji coba tersebut positif, maka inovasi dapat diadopsi lengkap dengan berbagai strateginya dalam skala yang lebih luas sesuai dengan tujuan, objek, dan sasaran paket inovasi tersebut (Miles 2011:19-20).

Ada lima aspek yang menjadi tantangan berat pembangunan pendidikan di Indonesia, sebagai mana dikemukakan Irianto (2011:94) yaitu:

1. Aspek peningkatan mutu, berkenaan dengan urgensi pemberian otonomi daerah, yang salah satunya adalah untuk menghadapi persaingan global. Setidaknya ada kemampuan dasar yang diperlukan agar masyarakat Indonesia dapat ikut dalam persaingan global, yaitu: (1) kemampuan manajemen, (2) kemampuan teknologi, dan (3) kualitas manusianya sendiri. Mutu yang diinginkan bukan hanya sekedar memenuhi standar lembaga, atau standar nasional semata-mata tetapi harus memenuhi standar internasional.
2. Masyarakat diperkirakan juga akan meningkatnya pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan. Tetapi ini akan membutuhkan biaya yang tinggi, dengan semakin tingginya jarak antar daerah dalam pemerataan fasilitas pendidikan, sangat potensial memunculkan ketimpangan dalam memperoleh mutu pendidikan. Tanpa intervensi manajemen, maka anggota masyarakat dari daerah kabupaten atau ke kota yang kaya dengan jumlah penduduk yang relative sedikit, akan dapat menikmati fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik dari anggota masyarakat pada daerah kabupaten atau kota yang miskin. Dana apabila kesempatan pendidikan ini juga mempengaruhi kesempatan untuk memperoleh penghasilan maka dalam jangka panjang akan berpotensi meningkatnya jurang kesenjangan ekonomi antar daerah. Aspek efisiensi manajemen, berkenaan dengan keterbatasan sumber pendanaan dalam perencanaan pendidikan. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan (*technical efficiency*)

maupun efisiensi dalam mengalokasikan anggaran (*economic efficiency*). Bukan sebaliknya, bahwa dengan melaksanakan otonomi daerah, pembiayaan justru meningkat karena bertambahnya struktur organisasi daerah yang menambah lebih banyak personil pemerintahan, tetapi tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Aspek peran serta masyarakat, berkenaan dengan filosofi diberikannya otonomi kepada daerah peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat berupa perorangan, kelompok, lembaga industri, atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Namun, perlu diantisipasi bahwa peranan masyarakat tersebut cenderung terbatas pada lingkungan kabupaten atau kota yang bersangkutan. Karena itu, perlu juga intervensi kebijakan nasional, yang dapat menerapkan subsidi silang supaya peran serta masyarakat dalam sistem desentralisasi tidak memperlebar jurang ketimpangan pemerataan fasilitas pendidikan antar daerah.

3. Akuntabilitas, Melalui otonomi, pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan jasa pendidikan semakin dekat dengan masyarakat yang dilayaninya, sehingga akuntabilitas layanan tersebut bergeser dari yang lebih berorientasi kepada kepentingan pemerintahan pusat kepada akuntabilitas yang lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Hal ini menuntut lebih besar partisipasi masyarakat dan orang tua dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan pendidikan di daerah masing-masing. Dalam konteks perubahan bidang pendidikan yang mencerminkan inovasi, ada beberapa isu penting yang perlu di kemukakan, yaitu:

Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru, dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada sebelumnya), serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Pendidikan adalah suatu sistem, maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lain, maupun sistem dalam arti yang luas misalnya sistem pendidikan nasional.

1. Tujuan Inovasi Pendidikan

Adapun tujuan inovasi pendidikan di Indonesia pada umumnya adalah:

- a. Lebih meratanya pelayanan pendidikan.
- b. Lebih serasinya kegiatan belajar.
- c. Lebih efisien dan ekonomisnya pendidikan.
- d. Lebih efektif dan efisiennya sistem penyajian.
- e. Lebih lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan.
- f. Lebih di hargainya unsur kebudayaan nasional.
- g. Lebih kokohnya kesadaran, identitas dan kesadaran Nasional.
- h. Tumbuhnya masyarakat gemar belajar.
- i. Tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah dicerna.
- j. Meluasnya kesempatan kerja.

2. Komponen Yang Mempengaruhi Inovasi Pendidikan

Adapun komponen-komponen inovasi adalah sebagai berikut:

- a. Inovator yang merupakan komponen yang utama dalam proses inovasi, dimana inovator memegang peranan penting dalam melaksanakan inovasi,
- b. Inovasi, inovasi disini adalah adanya permasalahan yang akan dipecahkan,
- c. Komunikasi dengan saluran tertentu artinya adanya sebuah pertukaran informasi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Karena komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan informasi mengenai inovasi dari seorang ke orang lain,
- d. Waktu, waktu merupakan elemen yang tidak kalah pentingnya dalam proses inovasi karena waktu merupakan aspek utama.

Di sisi lain Irianto (2011:113) menjelaskan bahwa indikator keberhasilan inovasi pendidikan mencakup:

1. Dapat tidaknya seseorang lulus melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.
2. Dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan
3. Besarnya penghasilan/ gaji yang diterima
4. Sikap perilaku dalam konteks social, budaya dan politik.

3. Prinsip-Prinsip Inovasi Pendidikan

Peter M. Drucker Dalam Bukunya *Innovation and Enterpreneurship* (Tilaar, 1999:356, mengemukakan beberapa prinsip Inovasi (Rusdiana 2014:46) yaitu sebagai berikut:

- a. Inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, Inovasi hanya dapat terjadi apabila mempunyai kemampuan analisis.
- b. Inovasi bersifat konseptual dan perceptual, Artinya yang bermula dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima masyarakat.
- c. Inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Keinginan yang kecil untuk memperbaiki sesuatu kondisi atau kebutuhan hidup ternyata kelak mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap kehidupan manusia selanjutnya.
- d. Inovasi diarahkan pada kepemimpinan atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi pelopor dari suatu pembaharuan yang diperlukan.

4. Tujuan Inovasi Pendidikan

Tujuan yang direncanakan mengharuskan adanya perincian yang jelas tentang sasaran dan hasil yang ingin dicapai, yang dapat diukur untuk mengetahui perbedaan antara keadaan sesudah dengan sebelum inovasi. Tujuan Inovasi adalah efisiensi, relevansi, dan aktivitas mengenai sasaran jumlah anak didik sebanyak-banyaknya, dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya (menurut kriteria kebutuhan anak didik, masyarakat dan pembangunan) dengan menggunakan sumber tenaga, Uang, alat, dan waktu dalam jumlah sekecil-kecilnya (Rusdiana 2014:48).

Tujuan utama dari inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yaitu kemampuan sumber tenaga, uang, sarana, dan masalah pendidikan umumnya dan perkembangan subjek pendidikan khususnya mengutamakan segi efektivitas dan segi ekonomis dalam proses belajar.

5. Bentuk-bentuk Inovasi Pendidikan

Dalam inovasi pendidikan, secara umum dapat diberikan dua buah model inovasi yang baru, yaitu sebagai berikut:

1. Top-Down Model

Top-Down Mode, yaitu Inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan/atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh kemendiknas kemenag selama ini. Inovasi pendidikan yang berupa *Top-Down Model* tidak selamanya berhasil dengan baik. Hal ini disebabkan oleh banyak hal antara lain penolakan para pelaksanan seperti guru yang tidak dilibatkan secara penuh, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2. Bottom-up Model

Inovasi yang lebih berupa *Bottom-up Model* dianggap sebagai suatu inovasi yang langgeng dan tidak muda berhenti karena para pelaksana dan pencipta sama-sama terlibat, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Oleh karena itu, masing-masing bertanggung jawab terhadap keberhasilan suatu inovasi yang mereka ciptakan. *Bottom-up Model* adalah model inovasi dan hasil ciptaan dari bawah serta dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan.

4. Pengertian pemerintah

Pemerintah dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai *governmen*, dimana kata itu berasal dari istilah Yunani gubernakulum yang artinya kemudi. Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih simpel lagi adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Berdasarkan itulah *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, volume 12 (1997), memberikan terminologi “pemerintah” dalam dua sisi pengertian yaitu dalam pengertian sempit dan dalam pengertian yang luas. Pengertian sempit, pemerintah diartikan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sedangkan dalam artian luas adalah seluruh lembaga dan kegiatannya dalam suatu negara, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan legislatif dan yudikatif. Pengertian ini memberikan makna bahwa pemegang kekuasaan tidak saja difokuskan pada lembaga eksekutif akan tetapi mereka para pelaku kelembagaan dalam berbagai kegiatannya dalam kehidupan suatu negara baik itu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Semuanya itu disebut sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan, yang secara kongkrit adalah mereka yang

mengemban bidang tugas pokok dan yang utama yaitu melaksanakan kehendak negara sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi negara. Kehendak setiap negara selalu terurai dengan tegas dalam tujuan yang hendak dicapai baik itu melalui tujuan yang bersifat internasional maupun yang bersifat nasional menuju tercapainya sasaran Negara yaitu suatu bentuk masyarakat yang diinginkan (Ali, 2012 :2).

Adapun menurut Nisjar (dalam Sitti Nurbaeti, 2014:12) istilah *governance* secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, pengarahan, pembinaan atau dalam bahasa inggrisnya adalah *guildin*. Nisjar mendefinisikan pengertian pemerintah secara etimologi kata “perintah” atau “menyuruh” atau “disuruh” , artinya melakukan sesuatu kegiatan yang bersifat menyuruh atau disuruh atau melakukan suatu pekerjaan “memerintah” atau “diperintah”. Dengan demikian ada dua makna kegiatan dari kata perintah, yang memerintah atau menyuruh, dan diperintah atau disuruh artinya yang memerintah mempunyai kuasa untuk menyuruh kegiatan yang bersifat perintah. Sedangkan yang diperintah berkewajiban untuk melaksanakan perintah. Namun setelah ditambahkan awalan “Pe” menjadi “pemerintah”, dapat diartikan sebagai badan, lembaga atau institusi yang melaksanakan kegiatan untuk memerintah.

Pemerintah setidaknya menunjuk pada empat pengertian pokok, yaitu pertama, pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioprasionalisasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Dalam konteks itu, semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan

pada per-forma pemerintah. Realitas ini dapat dilihat ketika seseorang menyadari bahwa semua aktivitas keteraturan dan ketertiban hingga urusan yang berbelit-belit dalam birokrasi merupakan mekanisme yang didesain secara sengaja oleh pemerintah. Bahkan, keadaan yang mencekam bagi keamanan setiap individu merupakan indikasi tentang hadir tidaknya sebuah pemerintahan (Thomas Hobbes dalam Labolo 2014: 17).

Langkah awal adanya peraturan pelaksanaan adalah dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah untuk mempercepat dan memastikan bergerakinya kegiatan pemerintahan daerah pasca dikeluarkannya UU 32/04. Peraturan pemerintah adalah salah satu produk politik yang dikeluarkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat daerah terutama didasari oleh asas keadilan dan kebenaran model peraturan pemerintah yang dimaksud menurut (Sarundajang 2012: 334) adalah sebagai berikut:

1. Peraturan pemerintah dibentuk untuk melaksanakan undang-undang.
2. Peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana, apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana.
3. Ketentuan peraturan pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan.
4. Peraturan pemerintah hanya berfungsi untuk menjalankan, menjabarkan atau merinci ketentuan undang-undang dan dapat dibentuk meski ketentuan undang-undang tersebut tidak tegas-tegas memintanya.
5. Ketentuan-ketentuan pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan. Peraturan pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata.

5. Konsep Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan

Mastery learning (belajar tuntas) adalah pendekatan pembelajaran yang mempersyaratkan siswa menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi maupun kompetensi dasar mata pelajaran tertentu. (Mulyasa dalam Satriawati 2010:53) bahwa *mastery learning* merupakan strategi pembelajaran yang dapat dilaksanakan di dalam kelas, dengan tujuan agar sebagian besar siswa dapat menguasai tujuan pembelajaran (kompetensi) secara tuntas. *Mastery learning* merupakan proses pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, bertujuan untuk mengadaptasikan pembelajaran pada siswa kelompok besar (klasikal), membantu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat pada siswa dan berguna untuk menciptakan kecepatan belajar (*rate of progress*).

Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) adalah kebijakan program pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang berupaya memberikan pelayanan pendidikan secara optimal kepada peserta didik melalui strategi penuntasan semua tagihan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran secara berkelanjutan. SKTB berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan yang hendak dicapai dengan SKTB adalah memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik, agar dapat belajar secara optimal dalam menuntaskan semua tagihan kompetensi pada seluruh mata pelajaran di setiap satuan pendidikan dan membantu memfasilitasi pengembangan potensi

anak didik secara utuh (kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan kinestetik) sejak awal agar terbentuk kepribadian yang utuh.

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan adapun Ruang Lingkup Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yaitu sebagai berikut:

a. Model Pembelajaran

Model Pembelajaran Sistem kelas Tuntas Berkelanjutan menekankan pada proses pembelajaran untuk membantu peserta didik belajar dalam kondisi psikologis yang positif, percaya diri, jujur dan mampu mengembangkan kreativitas.

b. Model manajemen sekolah

1. Rencana Kerja Sekolah (RKS)
2. Pengelolaan Keuangan sekolah
3. Kegiatan produksi dan jasa sekolah
4. Pengelolaan Kurikulum
5. Supervisi akademik
6. Pengelolaan peserta didik
7. Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah
8. Pembinaan Tenaga administrasi Sekolah
9. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran.
11. Monitoring evaluasi

Keunggulan sistem SKTB sendiri yaitu peserta didik belajar selalu dalam kondisi psikologis yang positif, percaya diri, jujur dan mampu mengembangkan kreativitas karena nasib mereka tidak ditentukan oleh Ujian

Nasional dan tes yang mengukur kemampuan sesaat dan setiap peserta didik terjamin mendapatkan haknya memperoleh pendidikan dasar 9 tahun. SKTB ini menggunakan Sistem Promosi Otomatis (*System Outomatic Promotion*) yang merupakan sistem yang tidak mengenal tinggal kelas bagi para peserta didik yang tidak berhasil menuntaskan kompetensi sesuai alokasi waktu yang tersedia. SKTB terdapat pula yang dinamakan pembelajaran remedial, pembelajaran remedial yang dimaksud adalah beberapa kompetensi yang belum dituntaskan dapat diulang tanpa harus mengulang semua kompetensi yang telah dituntaskan (Silfitriana 2017:7).

Secara garis besar SKTB terbagi menjadi kelas tuntas berkelanjutan terbatas dan kelas tuntas berkelanjutan tidak terbatas.

2. SKTB Terbatas

Yaitu dilakukan dimana setiap standar kompetensi yang kemudian mempunyai beberapa kompetensi dasar, ketika guru telah mengajarkan kompetensi dasar 1 kemudian melakukan evaluasi dengan syarat tuntas yaitu Kriteria Tuntas Minimal (KKM) yang telah ditentukan oleh sekolah dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) akan memperoleh peserta didik yang tuntas dan kelompok peserta didik yang tidak tuntas. Kelompok peserta didik yang tuntas kemudian diberikan pengayaan (*enrichment*) sambil menunggu kelompok lain menuntaskan pemebelajarannya. Bagi kelompok yang tidak tuntas diberikan pengulangan (*remedial*) setelah itu dilakukan evaluasi sampai semua kelompok yang tadinya tidak tuntas dapat menuntaskan

kompetensi dasar tersebut Setelah semuanya telah tuntas barulah dilanjutkan ke kompetensi selanjutnya.

2. SKTB Tidak Terbatas

SKTB tidak terbatas maksudnya adalah setelah peserta didik mempelajari suatu kompetensi kemudian dilakukan evaluasi. Ketika peserta didik telah melakukan evaluasi kemudian terdapat dua kelompok ada yang tuntas dan ada yang tidak tuntas. Maka kelompok yang telah berhasil tuntas dapat segera melanjutkan ke kompetensi berikutnya tanpa harus menunggu kelompok belum tuntas, sedangkan kelompok yang belum tuntas diberikan pengulangan (*remedial*) kemudian dilakukan evaluasi sampai mendapatkan ketuntasan, kemudian barulah dapat melanjutkan ke kompetensi berikutnya. Sehingga bagi kelompok peserta didik yang dapat tuntas dengan cepat tidak terhambat oleh kelompok yang belum tuntas.

Secara operasional pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan adalah setiap peserta didik (Hidayat Ayatollah 2014:26).

- a. Tuntas menyelesaikan kompetensi dasar sebagaimana dinyatakan dalam indikator.
- b. Tuntas menyelesaikan suatu mata pelajaran sesuai persyaratan yang dinyatakan dalam Kriteria Tuntas Minimal (KKM).
- c. Tuntas menyelesaikan mata pelajaran satu semester berdasarkan beban SKS.
- d. Tuntas menyelesaikan pembelajaran seluruh matapelajaran pada kelas yang diikuti.

- e. Berkelanjutan mengikuti pelajaran pada kelas berikutnya walaupun ada mata pelajaran yang memenuhi KKM .Peserta didik tidak tinggal kelas dan mengulang seluruh mata pelajaran di kelas tersebut , tetapi menyelesaikan ketuntasan pada mata pelajaran yang belum memenuhi KKM pada waktu belajar dikelas berikutnya.
- f. Berkelanjutan mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan di atasnya (SD/MI SMP/MTs, SMA/SMK).

Selanjutnya, dalam pelaksanaan SKTB di Kabupaten Gowa dirumuskan 6 (enam) tujuan pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan, yaitu:

- a. Memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik dalam atmosfir yang kondusif, sehingga anak didik dapat belajar secara optimal dalam suasana belajar yang menyenangkan sehingga anak didik dapat menuntaskan semua tagihan kompetensi pada seluruh mata pelajaran di setiap satuan pendidikan di Kabupaten Gowa.
- b. Bagi anak didik yang dapat menuntaskan semua tagihan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran sebelum waktunya, maka akan diberikan kesempatan untuk mengambil kompetensi dasar mata pelajaran berikutnya tanpa harus menunggu masa kenaikan kelas (*automatic promotion*)
- c. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh anak didik di Kabupaten Gowa.
- d. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak didik secara utuh (kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual,

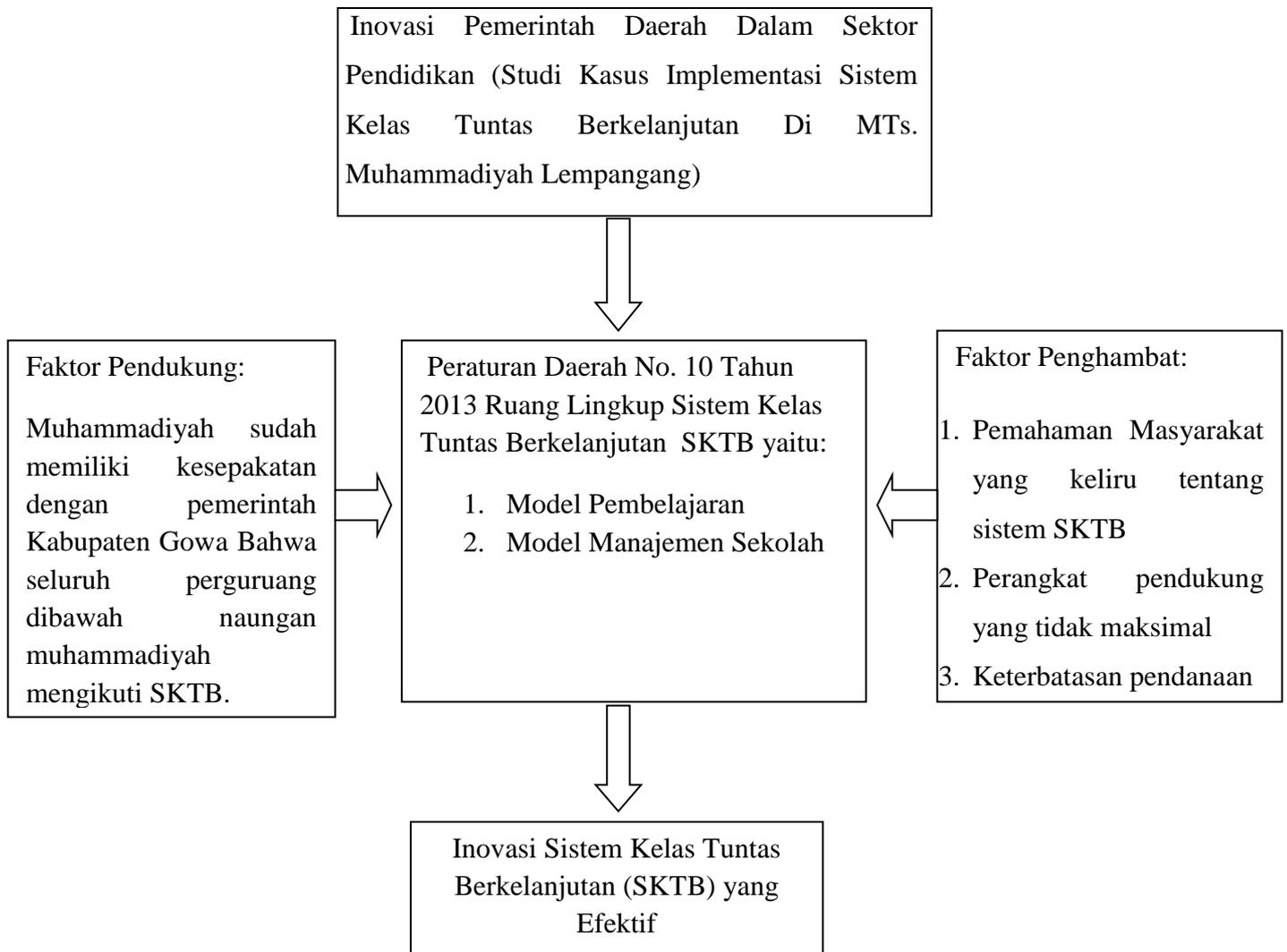
dan kecerdasan kinestetik) sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.

- e. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; dan
- f. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standard nasional dan global (Dikorda, 2013:10).

B. Kerangka fikir

Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) adalah kebijakan program pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang berupaya memberikan pelayanan pendidikan secara optimal kepada peserta didik melalui strategi penuntasan semua tagihan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran secara berkelanjutan. SKTB berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun Komponen sistem sosial untuk melakukan Inovasi Pendidikan jelas menjadi indikator yang sangat penting dalam mengukur pelaksanaan Inovasi pendidikan hal ini, Model Pembelajaran dan Model manajemen Sekolah Untuk lebih jelasnya dijelaskan pada bagan kerangka pikir berikut ini.

Bagan Kerangka Fikir



C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan karya ilmiah ini. Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka konsep. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

untuk mengetahui bagaimana Inovasi Pemerintah Daerah dalam Sektor pendidikan (Studi Kasus Implementasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di MTs. Muhammadiyah Lempangan).Kab. Gowa

D. Deskriptif Fokus Penelitian

1. Model Pembelajaran yaitu menekankan pada proses pembelajaran untuk membantu peserta didik belajar dalam kondisi psikologis yang positif, Percaya diri, jujur dan mampu mengembangkan kreativitas disekolah.

a. Proses Belajar Mengajar

Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan interaksi antara guru dan siswa dimana akan di akhiri hasil belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang berlangsung dalam suatu lokasi dan jangka waktu tertentu.

b. Penilaian Pendidik Terhadap siswa

Penilaian pendidik terhadap siswa merupakan suatu proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Perkembangan belajar di perlukan disepanjang proses pembelajaran, dan penilaian tidak hanya dilakukan diakhir periode (semester) melainkan dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran termasuk penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap dan spiritual.

2. Model Manajemen Sekolah merupakan suatu model pembelajaran yang menyangku tentang kurikulum dan proses pembelajaran disekolah.

a. Pengelolaan Kurikulum

Pengelolaan Kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

b. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan

Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan sangat berpengaruh dengan pembelajaran siswa karena Inovasi pendidikan harus memperhatikan bagaimana keseimbangan personil pendidik, tenaga administrasi dengan siswa yang ditangani untuk di didik dan disiplin dengan baik.

c. Pengelolaan sarana dan prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang di lakukan di dalam pelayanan publik karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

d. Teknologi Informasi dan komunikasi dalam Pembelajaran

Teknologi Informasi dan komunikasi sebagai basis pada sistem pembelajarannya di sebabkan dengan beberapa faktor untuk itu diperlukan suatu manajemen dan strategi yang tepat agar penerapan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di sekolah dapat sejalan dengan tujuan yang telah di rumuskan di sekolah.

e. Pengelolaan Peserta didik

Pengelolaan Peserta didik merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan. Adapun lokasi penelitian ini adalah MTs. Muhammadiyah Lempangan Kabupaten Gowa. Alasan Peneliti memilih Lokasi ini Karena Kabupaten Gowa adalah salah satu yang pertama menerapkan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB). Oleh karena itu, Peneliti ingin meneliti tentang Inovasi Pemerintah Daerah dalam sektor Pendidikan studi kasus Implementasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di MTs. Muhammadiyah Lempangan Kab.Gowa.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. yakni, mendeskripsikan tentang Inovasi pemerintah daerah dalam sektor pendidikan studi kasus implementasi SKTB di MTs. Muhammadiyah lempangang kabupaten Gowa. Sehubungan dengan hal yang diteliti adalah fenomena social atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial, maka dibutuhkan informasi mendalam melalui pendeskripsian berdasarkan ungkapan maupun bahasa masing-masing informan sehingga dapat di ungkap makna sebenarnya dari informan yang diperoleh.

2. Tipe penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan Studi Kasus. Yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan implementasi yang terjadi di lapangan. Masalah yang akan diteliti terkait Inovasi pemerintah daerah dalam sector pendidikan Studi Kasus Implementasi Sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) di MTs. Muhammadiyah lempangang Kab. Gowa.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

1. Data Primer merupakan data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara pada penelitian ini data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara atau Tanya jawab langsung dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi pemerintah daerah dalam sector pendidikan Studi kasus Implementasi Sistem Kelas tunas berkelanjutan (SKTB) di MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa.
2. Data Sekunder merupakan data yang di peroleh peneliti melalui dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis dan dikumpulkan yang digunakan dalam penelitian pelaksanaan Inovasi Pemerintah daerah dalam sector pendidikan Studi kasus Implementasi Sistem Kelas tunas berkelanjutan (SKTB) di MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah orang-orang yang di anggap mampu memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai pelaksanaan implementasi SKTB. Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah pimpinan ataupun masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Inovasi Pemerintah daerah dalam sektor pendidikan Studi kasus Implementasi Sistem Kelas tunas berkelanjutan (SKTB) di MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* Menurut Sugiyono (2013:126) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilang sampel pada sumber data dengan perbandingan tertentu. perbandingan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang bisa dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti mengkaji objek atau situasi sosial yang akan diteliti.

Adapun yang dijadikan Informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Inisial	Jumlah
1	H. Syahrir, S.Pd	Kepala MTs. Muhammadiyah Lempangang	HS	1 Orang
2	Fitriany, S.Pd	Wakamad Bidang Kurikulum	FI	1 Orang
3	Sahri Mulia, S.Pdi	Wakamad Bidang Kesiswaan	SM	1 Orang
4	Canrakaira, S.Pdi	Guru Bidang Studi	CK	1 Orang
5	Haerani, S.Ag	Guru Bidang Studi	HI	1 Orang
6	ST. Sahdana Husnaini S.Pd	Guru Bidang Studi	SS	1 Orang

7	Nurul Safitri	Siswa Kelas 1	NS	1 Orang
8	Riswanto	Siswa Kelas 2	RO	1 Orang
9	Reski Amelia	Siswa Kelas 3	RA	1 Orang
10	Norma	Masyarakat/Orang Tua Siswa	NA	1 Orang
11	Salehuddin	Masyarakat/Orang Tua Siswa	SL	1 Orang
Jumlah		11 Orang		

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan peneliti ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni:

1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang benar-benar terjadi di MTs. Muhammadiyah Lempangang Kabupaten Gowa . kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan-keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dan kenyataan yang terjadi dilapangan dalam hal pelaksanaan Inovasi Pemerintah daerah dalam sektor pendidikan Studi kasus Implementasi Sistem Kelas tunas berkelanjutan (SKTB) di MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa.

2. Teknik Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan Tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang di ambil sebagai sampel baik dari kepala madrasha, Waksek bagian Kurikulum dan kesiswaan,

Guru, Siswa dan Orang tua siswa yang di anggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait Implementasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB).

3. Teknik Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau buku-buku yang berkaitan erat Inovasi Pemerintah daerah dalam sektor pendidikan Implementasi Sistem Kelas tunas berkelanjutan (SKTB) di MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa. Sehingga menunjang kerelevanan data. Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitanya dengan pokok dari permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik Analisis data yang digunakan pada peelitian ini dikemukakan oleh Menurut Milles and Huberman, (2012: 173-174) memiliki tiga langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan focus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat.

Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah

bersifat naratif hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan . kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada dilapangan kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

4. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2011:121) Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, dan uji comfirmability. Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data yaitu triangulasi sumber, triangulasi Teknik dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara,

membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada pada salah satu sekolah yang menerapkan Sistem Kelas Tuntas berkelanjutan di MTs. Muhammadiyah lempangang kab. Gowa.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi Waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja, sehingga data yang diperoleh di MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa Valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum MTs. Muhammadiyah Lempangang

MTs. Muhammadiyah Lempangang merupakan salah satu Sekolah (muallimin) yang ada di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Keadaan MTs. Muhammadiyah Lempangang terletak di bagian paling utara sekaligus merupakan pintu Gerbang kecamatan Bajeng dengan luas Lokasi 2.306 M (Bersertifikat). Dengan jumlah lokal 1 ruang kantor/kepala Madrasah, 1 ruang guru, 4 ruang kelas, Mushollah dan jumlah guru 35 Orang dan TU sebanyak 6 orang.

2. Visi dan Misi MTs. Muhammadiyah Lempangang

Adapun Visi dan Misi MTs. Muhammadiyah Lempangang adalah Sebagai Berikut:

a. Visi

Menciptakan generasi yang berjiwa Islami penuh prestasi dan berdaya.

b. Misi

1. Menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
2. Membimbing kearah penegakan akhlakul karimah
3. Membentuk generasi yang kreatif, berdedikasi penuh karya dan memiliki ketrampilan.Menerapkan disiplin dan menghargai waktu.
4. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat sebagai sarana pembentukan akhlak dan tempat berkreasi.

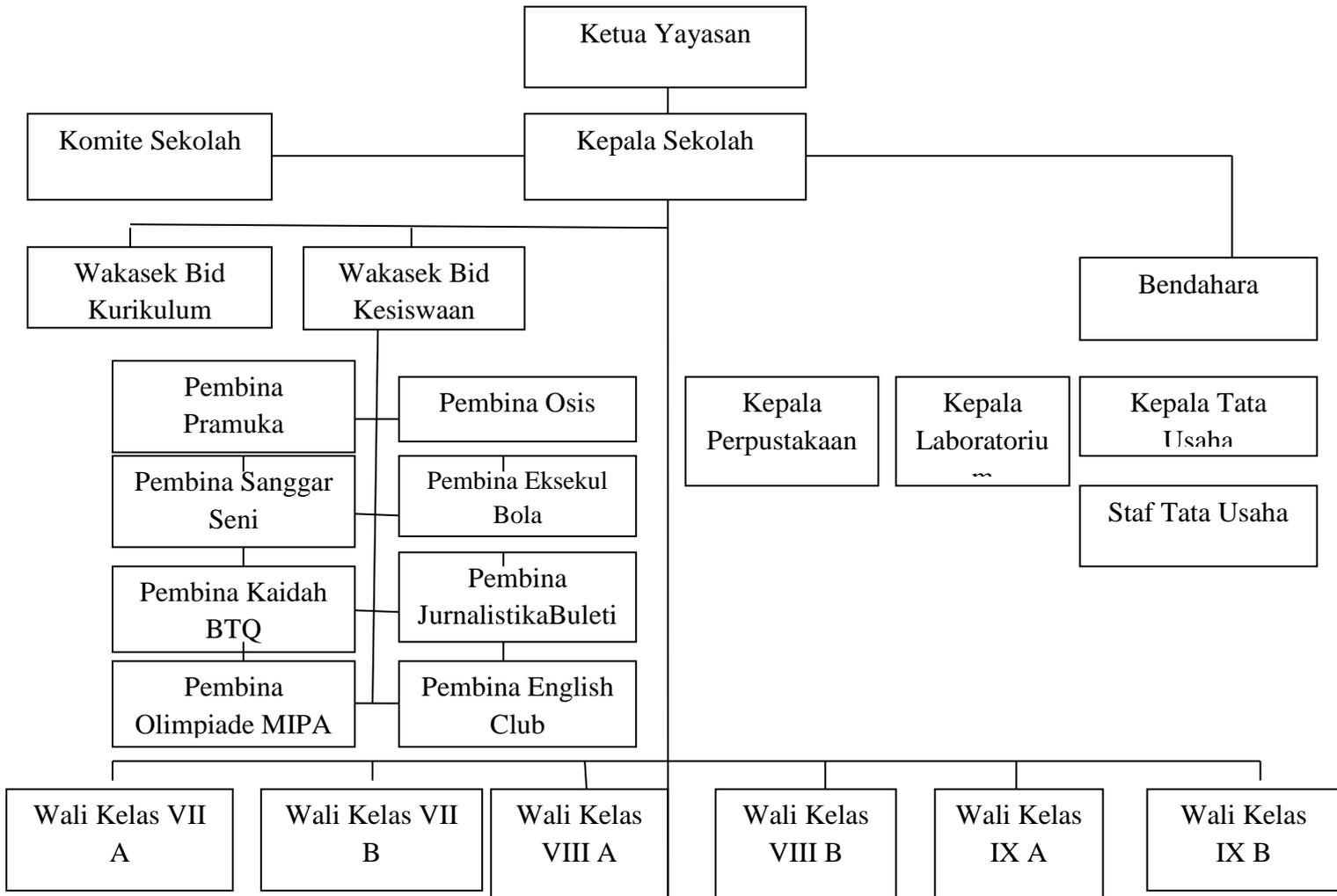
3. Tujuan MTs. Muhammadiyah Lempangang

1. Memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan yang bernafaskan Islam.
2. Mengembangkan potensi SDM pendidikan sesuai dengan kebutuhan lembaga persyarikatan dengan menyediakan fasilitas pembelajaran.
3. Menerima peserta didik dan memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga persyarikatan.

4. Struktur Organisasi MTs. Muhammadiyah Lempangang

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya MTs. Muhammadiyah Lempangang, kabupaten Gowa tentunya harus memiliki pembagian tugas (*division of labour*) yang jelas. Adapun Struktur Organisasi MTs. Muhammadiyah Lempangang adalah Sebagai Berikut.

**STRUKTUR ORGANISASI MTs. MUHAMMADIYAH
LEMPANGANG KABUPATEN GOWA**



5. Tugas Pokok

a. Kepala Madrasah

Kepala MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab.Gowa mempunyai tugas Pokok yaitu berfungsi dan bertugas sebagai Edukator, Manejer, Administrator dan Supervisor, Pemimpin / Leader Inovator dan Motivator. Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana pada poin 1. Kepala Madrasah menyelenggarakan Fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Madrasah selaku Edukator bertugas melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) secara efektif dan efisien.
- b. Kepala Madrasah selaku Manejer yang meliputi, Menyusun Perencanaan, Mengarahkan Kegiatan, Mengkoordinasikan Kegiatan, Melaksanakan Pengawasan, Melakukan evaluasi terhadap kegiatan, Menentukan Kebijakan, Mengadakan Rapat, Mengambil Keputusan, Mengatur Proses Belajar mengajar, Mengatur administrasi, Ketatausahaan, Siswa, Ketenangan, Sarana dan Prasarana, dan Keuangan / RAPBS, Mengatur Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Mengatur hubungan Madrasah dengan masyarakat dan Instansi terkait.
- c. Menyelenggarakan Administrasi yang meliputi, Perpustakaan, Perencanaan Laboratorium, Pengorganisasian Ruang Keterampilan, Pengarahan Bimbingan Konseling, Pengkoordinasian UKS, Pengawasan OSIM, Kurikulum Serbaguna, Kesiswaan Media, Ketatausahaan Gudang, Ketenangan 7 K, Kantor, Keuangan.

d. Pemimpin/Leader yang Meliputi, Dapat dipercaya, jujur dan bertanggung jawab, Memahami kondisi Guru, Karyawan dan Siswa, Memiliki Visi dan memahami Misi Madrasah, Mengambil Keputusan urusan Intern dan Ekstern Madrasah, Membuat, mencari dan memilih gagasan Guru.

b. Wakasek Bidang Kurikulum

Membantu Kepala Madrasah dalam menyusun Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengkoordinasian, Pengawasan, Penilaian, serta menyusun Laporan Kegiatan Pengelolaan Madrasah, Membantu Kepala Sekolah dalam Perencanaan ,Monitoring, dan Evaluasi serta Pelaporan Kegiatan Kurikulum.

1. Mengkoordinasikan Program Kerja Madrasah
2. Mengkoordinasikan kegiatan staf urusan Madrasah
3. Melakukan pengarahan dan pembinaan secara teknis terhadap Guru, Karyawan dan Siswa.
4. Mengendalikan secara teknis jalannya Madrasah secara KBM dapat berjalan secara optimal.
5. Merekap data Presensi Guru dan Karyawan untuk Laporan Bulanan.
6. Mewakili Kepala Madrasah dalam hal-hal tertentu.
7. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Pendidikan Tahunan.
8. Menyusun program kerja Bidang Kurikulum.
9. Menyusun dan menjabarkan Kelender Pendidikan.
10. Menyusun pembagian tugas Guru dan Jadwal pelajaran.

c. Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan

Membantu Kepala Madrasah dalam menyusun Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan kegiatan pembinaan Kesiswaan. Rincian Tugas Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan yaitu sebagai Berikut:

1. Menyusun program kerja pembinaan siswa.
2. Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan siswa baru berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Mengkoordinir pelaksanaan Bimbingan dan Konseling.
4. Mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan 7K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan).
5. Mengatur dan membina progrsm kegiatan OSIM, meliputi Kepramukaan, Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Patroli Keamanan Madrasah (PKM) dan Paskibra.
6. Mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan Ekstrakurikuler.
7. Mengkoordinasikan program kegiatan keagamaan, seperti Pasantren Kilat, atau program kegiatan keagamaan lainnya.
8. Mengkoordinasikan program pelaksanaan pemilihan Siswa Teladan.
9. Mendampingi setiap rapat-rapat kegiatan bidang Kesiswaan.
10. Mendampingi siswa dalam setiap kegiatan / perlombaan / pertandingan, baik yang diadakan di Madrasah maupun diluar Madrasah.

B. Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Sektor Pendidikan (Studi Kasus Implementasi SKTB Di MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa.

Inovasi Pemerintah Daerah untuk mengupayakan Peningkatan Kesejahteraan Bagi masyarakat atau mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat dan daerahnya Di Indonesia istilah inovasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintah mulai mengemukakan terutama sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tahun 2001 jumlah daerah giat mengembangkan inovasi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, pelayanan public dan perbaikan iklim ekonomi dan pendidikan. Adapun undang-undang khusus tentang inovasi telah ada landasan hukumnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bertajuk inovasi daerah dari pasal 386 hingga pasal 390 undang-undang 23/2014 inovasi yang dimaksud dalam pasal 386 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk pembaharuan antara lain penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Inovasi menurut Kusmana (2010:54), Inovasi adalah suatu hasil penciptaan sesuatu yang dianggap baru yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah, baik berupa ide, barang, kejadian, metode dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sesuai dengan teori tersebut Saat ini Kabupaten Gowa mengeluarkan kebijakan dalam bidang pendidikan , salah satu kebijakan program pendidikan Ichsan Yasin Limpo melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diterapkan di Kabupaten Gowa adalah SKTB. Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) adalah kebijakan program pendidikan yang berupaya

memberikan pelayanan pendidikan secara optimal kepada peserta didik melalui strategi penuntasan semua tagihan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran secara berkelanjutan.

Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) ini mulai disosialisasikan pada tahun 2011. Sebagai langkah awal pada tahun 2012 SKTB dijalankan di beberapa sekolah percontohan tepatnya 50 sekolah untuk tingkatan SD, SMP/MTs dan SMA/SMK di Kabupaten Gowa. Pada tahun 2013 sistem ini benar-benar dijalankan di seluruh tingkatan sekolah dasar hingga menengah atas di Kabupaten Gowa tanpa terkecuali baik sekolah negeri dan swasta.

Keberhasilan kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) ini dalam pelaksanaannya sebenarnya sangat ditentukan oleh peranan kepala sekolah terlebih lagi seorang guru, karena merekalah yang terjun langsung dalam implementasi kebijakan ini. Guru dan kepala sekolah memiliki keterikatan yang sangat erat dan saling ketergantungan oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik antar keduanya dalam mencapai keberhasilan. Pada akhirnya akan mempengaruhi kesuksesan dan keberhasilan peserta didik dalam kelas.

Ruang Lingkup Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan SKTB yang meliputi model pembelajaran dan model Manajemen sekolah yaitu sebagai berikut:

a. Model Pembelajaran

Model Pembelajaran Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan menekankan pada proses pembelajaran untuk membantu peserta didik belajar dalam kondisi psikologis yang positif, Percaya diri, jujur dan mampu mengembangkan kreativitas disekolah. Adapun hasil penelitian terkait masalah Model

Pembelajaran. Dari hasil Wawancara dengan kepala Madrasah Bagian Kurikulum

MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa mengatakan bahwa:

“Selama ini pengambilan keputusan yang ada di sekolah itu selalu dirapatkan oleh orang tua siswa misalnya ada yang tidak tuntas maka siswa itu harus di panggil orang tuanya jadi tetap ada kontrolnya yang di takutkan ada siswa yang tinggal kelas dan orang tuanya tidak tau apa-apa maka mereka bisa keberatan dengan keputusan yang di buat oleh sekolah ketika tidak ada pemberitahuan orang tua siswa sebelumnya karena ketika 3 mata pelajaran tidak tuntas maka siswa harus menuntaska dulu baru bisa naik kelas dan bisa mengulang sambil belajar misalnya guru yang bersangkutan memberika remedial melalui tugas untuk menyelesaikan Kompetensi Dasar (KD) yang tertinggal dan tidak semua mata pelajaran yang di ulang, cuman di sesuaikan dengan dimana siswa bermasalah maka cuman itu yang harus di tuntaskan dan bisa saja ada KD-KD tertentu yang tidak di lulusi maka cuman itu yang di berikan tugas jadi tidak mesti semua 1 pelajaran full di ulangi” (Hasil wawancara dengan FI, Tanggal 16 Juli 2018).

Dari Hasil Wawancara di atas juga didukung dengan Hasil Wawancara

Salah satu Guru MTs. Muhammadiyah Lempangang yang mengatakan bahwa:

“Memberikan jangka minimal waktu untuk menuntaskan nilai yang di remedialkan dan memberikan penugasan dan guru memantau setiap pengerjaan tugas pada siswa tersebut dan memberikan atau memfasilitasi kepada anak didik semaksimal mungkin agar mengulangi remedial dan memberikan tugas ekstra yang mengharuskan tugas selesai sampai ujian mau dimulai” (Hasil Wawancara dengan CK, Tanggal 20 Juli 2018).

Model Pembelajaran yang harus efektif karena siswa bisa termotivasi dalam melakukan Proses Belajar di kelas ketika Modelnya disesuaikan dengan Pelajarannya. Hal ini Sesuai hasil Wawancara dengan salah satu Siswa Kelas 1

MTs. Muhammadiyah Lempangang yang mengatakan bahwa:

“Model pembelajaran yang diajarkan guru disini setiap hari dengan membacakan materinya dan dibagikan foto copy untuk dipelajari dalam kelas dan biasa juga mengirim tugas lewat Internet/ Email dan kalau tidak tuntas maka di remedialkan sampi tuntas ”

Kesimpulan dari hasil Wawancara bahwa Model Pembelajaran sekolah yaitu melakukan sosialisasi berkaitan program pendidikan dalam hal ini pelaksanaan Sistem kelas Tuntas Berkelanjuta (SKTB) kepada orangtua siswa/masyarakat untuk mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan. Keberhasilan kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) ini dalam pelaksanaannya sebenarnya sangat ditentukan oleh peranan kepala sekolah terlebih lagi seorang guru, karena merekalah yang terjun langsung dalam implementasi kebijakan ini. Guru dan kepala sekolah memiliki keterikatan yang sangat erat dan saling ketergantungan terkait masalah model pembelajaran di sekolah oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik antar keduanya dalam mencapai keberhasilan. Pada akhirnya akan mempengaruhi kesuksesan dan keberhasilan peserta didik dalam kelas.

Berdasarkan Observasi yang telah diperoleh selama dilapangan, bahwa model pembelajaran yang di lakukan di sekolah sudah mencapai keberhasilan karena komunikasi antara guru dan siswa sudah aktif untuk memantau jalannya penuntasan mata pelajaran dan siswa juga sudah di ajarkan sikap yang jujur dan percaya diri komunikasi antara siswa dan guru sudah aktif dan proses pembelajaran di sekolah berjalan dengan baik untuk mengembangkan kreatifitas siswa dan Peranan yang sangat penting di sekolah adalah komunikasi antara siswa dan guru.

1. Proses Belajar Mengajar

Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan interaksi antara guru dan siswa dimana akan di akhiri hasil belajar dalam upaya mencapai tujuan

pembelajaran yang berlangsung dalam suatu lokasi dan jangka waktu tertentu. Adapun hasil penelitian terkait masalah Pengelolaan Kurikulum. Dari hasil Wawancara dengan Guru MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa mengatakan bahwa:

“Memantau terus mengedukasi memberikan motivasi untuk mendalami implementasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) sehingga Sistem Kelas Tuntas berkelanjutan Berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang di harapkan.”(Hasil wawancara dengan SS, 17 Juli 2018).

Dari hasil wawancara di atas bahwa proses belajar mengajar guru selalu memberikan motivasi pada siswa sehingga mereka tidak ada yang bermasalah dalam proses belajar mengajar dan bisa mencapai Implementasi Sistem Kelas Tuntas berkelanjutan yang efektif sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun Hasil wawancara dengan salah satu Siswa MTs. Muhammadiyah lempangang yang mengatakan bahwa:

“Saya selama proses Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan berlaku di sekolah teman-teman saya banyak yang bahagia karena na bilang sudah tidak ada lagi sistem Tinggal kelas tetapi Guru-guru juga sudah semakin disiplin selama berlaku ini Sistem kelas Tuntas Berkelanjutan SKTB” (Hasil Wawancara dengan RA, 18 Juli 2018).

Dari hasil wawancara di atas adanya Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) model belajar mengajar disekolah sudah di siplin terkait dengan adanya Inovasi bahwa tidak sistem tinggal kelas jadi peran guru dalam mendidik siswanya harus lebih efektif. terkait dan diperjelas dengan Hasil Wawancara dengan salah satu Guru MTs. Muhammadiyah lempangang yang mengatakan bahwa:

“Memberikan Motivasi supaya siswa mau belajar untuk menuntaskan nilai-nilainya yang bermasalah dan yang tidak tuntas wajib di

ulang/remedial sesuai dengan Nilai KKN dengan cara memberikan tugas mau dalam bentuk tulisan atau Lisan'' (Hasil Wawancara dengan HI, 18 Juli 2018).

Dapat disimpulkan bahwa Proses Belajar mengajar di MTs. Muhammadiyah lempangang Kab. Gowa sudah berjalan dengan baik dan peran guru-guru dalam memberikan Motivasi pada siswanya sudah terlaksana sesuai yang di harapkan dan disisi lain Siswa harus menuntaskan pelajarannya dengan cara di berikan remedial atau pengulangan sampai betul-betul tuntas dan bisa lanjut ke kelas selanjutnya. Guru dituntut kreatif dan menghasilkan alternatif proses pembelajaran yang baik dan tidak monoton sehingga peserta didik yang kurang mampu dalam pelajaran tertentu, dapat dibantu menuntaskan pembelajaran tersebut. Salah satu bentuk kreatifitas guru adalah bagaimana membuat kelas menjadi ramai dengan gagasan dan siswa dapat menjadi bagian penuh dari proses belajar mengajar.

Berdasarkan Observasi yang telah diperoleh selama dilapangan bahwa proses belajar mengajar sudah efektif dan guru-guru juga sudah sangat disiplin dalam proses belajar mengajar dalam memberikan motivasi dan berbagai cara yang dilakukan demi untuk menuntaskan remedial atau pengulangan siswanya dan disini ketika di berikan remedial akan tetapi masih belum tuntas maka guru berinisiatif kembali untuk memberikan yang paling muda sehingga siswa cepat menuntaskan pelajarannya dan bisa kembali ke kelas selanjutnya.

2. Penilaian Pendidik Terhadap siswa

Penilaian pendidik terhadap siswa merupakan suatu proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar peserta

didik. Perkembangan belajar di perlukan disepanjang proses pembelajaran, dan penilaian tidak hanya dilakukan diakhir periode (semester) melainkan dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran termasuk penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap dan spiritual. Adapun hasil penelitian terkait masalah Penilaian Pendidik terhadap siswa Dari hasil Wawancara dengan Guru MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa mengatakan bahwa:

“Sistem ini sangat bagus, karena terdapat penguatan pada proses pembelajarannya diantaranya deteksi dini, klinik dini, remedial dan pengayaan. Ke empat komponen ini yang memperkuat pelaksanaan SKTB, selain itu SKTB mengakui adanya keberagaman atau perbedaan individu , yaitu mengakui adanya peserta didik yang cepat dan lambat dalam memahami pelajaran, dalam SKTB juga terdapat Sistem Kredit Semester (SKS), sehingga peserta didik dapat melakukan percepatan dalam studinya”(Hasil Wawancara dengan HI, 17 Juli 2018).

Penilaian Pendidik terhadap siswa itu adalah kewajiban seorang guru untuk mengetahui kemampuan setiap siswa dan guru juga bisa melihat perbedaan-perbedaan setiap siswa dan guru semakin menekan kan siswa untuk lebih rajin belajar sehingga bisa mempercepat Studinya.

Peran Guru dalam melakukan penilaian terhadap siswa yaitu dengan melihat atau memperhatikan kemampuan siswa dengan berbagai macam kriteria penilaian dan penilaian pengetahuan siswa dapat di ketahui oleh pendidik pada saat melakukan proses belajar mengajar. Hal ini Sesuai hasil Wawancara dengan salah satu Guru Bidan studi MTs. Muhammadiyah Lempangang yang mengatakan bahwa:

“Disini Siswa dapat di lihat kecerdasanya pada saat mereka menerima pelajaran dalam kelas dan ada perbedaan cara mengeluarkan pendapat dengan teman-temannya yang lain dan disini siswa juga di lihat bagaimana kemampuan siswa tersebut menerima semua mata pelajaran

dan ada juga siswa yang cerdas tapi dilihat dari kehadirannya dia malas begitupun sebaliknya jadi siswa dikatakan mampu dalam pelajaran apabila mereka mampu mengituki semua Kompetensi Dasar yang berlaku.”(Hasil Wawancara dengan SS, 18 Juli 2018).

Pengetahuan siswa biasa berpengaruh tergantung dari bagaiman proses belajar mengajar disekolah apabila proses belajar mengajar baik sesuai dengan Kewajiban Guru maka siswa juga bisa tambah serius dalam melakukan proses belajar mengajar di sekolah.

Penilaian Pendidik terhadap siswa itu adalah bentuk keseriusan pendidik dalam melakukan pengawalan oleh siswanya. Hal ini Sesuai hasil Wawancara dengan salah satu Guru Bidan studi MTs. Muhammadiyah Lempangang yang mengatakan bahwa:

“Penilaian Guru pada siswa di lihat dari kemampuannya dalam kelas kehadirannya dan adapun penilaian-penilaian guru terhadap siswa dan kehadirannya juga sangat berpengaruh terhadap penilaian guru karena ada Kompetensi Dasar (KD) yang di gunakan oleh guru dalam menilai siswa dilihat dari Pengetahuan, keterampilannya dan Sikap siswa.”(Hasil wawancara dengan HI, 20 Juli 2018).

Hasil Wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Penilaian Pendidik terhadap siswa dilihat dari kecerdasan pengetahuan siswa dan Guru menggunakan Kompetensi Dasar (KD) dalam menilai siswa dilihat dari kemampuannya, keterampilan, dan sikap untuk menunjukkan bahwa siswa mampu menuntaskan setiap pelajaran yang diberikan dan Pada akhirnya akan mempengaruhi kesuksesan dan keberhasilan peserta didik dalam kelas.

Berdasarkan Observasi yang telah diperoleh selama dilapangan, menunjukkan bahwa penilaian Guru di sekolah menunggunakn Kompetensi Dasar (KD) untuk melihat kecerdasan kempauan siswa, keterampilan dan sikap dan

masih banyak siswa yang melakukan remedial atau tidak tuntas dalam pelajaran akan tetapi guru-guru disekolah melakukan terus-menerus pengulangan atau remedial dan remedial yang dilakukan tidak sama dengan sekolah lain akan tetapi disini melakukan remedial khusus untuk Kompetensi Dasar yang bermasalah saja misalnya dalam satu pelajaran itu tidak semua di remedialkan akan tetapi khusus untuk yang bermasalah makanya diberikan remedial terus-menerus oleh guru disekolah.

Model Pembelajaran yang di gunakan peserta didik harus menuntaskan kompetensi Dasar dan Peserta didik tidak harus mengulangi kembali semua pelajaran yang ada, cukup dengan mengikuti klinik dini dan akan dibimbing hingga tuntas, untuk setiap pelajaran yang belum mencapai standar nilai. Program-program tersebut menggambarkan efisiensi waktu, tenaga, dan dana dengan tidak mengesampingkan hasil kuantitas yang banyak dan kualitas yang bereputasi. Program ini memberikan gambaran bahwa sesungguhnya tidak ada siswa yang payah atau tidak cerdas. maka siswa yang belum tuntas pelajarannya akan digenjut agar dapat menyelesaikan pelajaran dengan baik, sehingga dapat mengejar siswa lainnya yang lebih dahulu menuntaskan pembelajaran tersebut. Guru pun dituntut agar tidak cuek atau merasa masa bodoh dengan siswa yang belum tuntas, karena tanggung jawab guru di sekolah merupakan porsi utama dari program ini.

b. Model Manajemen Madrasah

1. Pengelolaan Kurikulum

Pengelolaan kurikulum baru merupakan suatu inovasi pendidikan yang perlu memperhatikan cara membuat persiapan mengajar, pengajaran individu, kelompok dan sebagainya. Pengelolaan Kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun hasil penelitian terkait masalah Pengelolaan Kurikulum. Dari hasil Wawancara dengan Wakil kepala Madrasah Bagian Kurikulum MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa mengatakan bahwa:

“Kurikulumnya tergantung dari guru-gurunya sesuai dengan silabus dan RPP yang guru pakai jadi metode yang dilakukan itu di sesuaikan oleh Guru masing-masing dengan menggunakan K13 dan Jumlah Jam mengajarnya juga lebih banyak. disesuaikan saja KD apa yang dia ajarkan karena K13 itu sudah ada kegiatan-kegiatan yang sudah terstruktur dengan kegiatan itu dapat di sesuaikan apa-apa yang di ajarkan jadi pada awal pembelajaran masing-masing guru sudah harus membuat RPP jadi ketika RPP belum selesai maka guru juga susah menjara karena berpatokan pada RPP masing-masing dan setiap tahun ada perubahan kurikulum jadi ketika kurikulum berubah maka materinya juga akan berubah terkadang ada materi kelas satu ke kelas 2 begitupun sebaliknya sesuai dengan gurunya”(Hasil Wawancara dengan FI, Tanggal 16 Juli 2018).

Penggunaan Kurikulum yang di berlaku yaitu dengan menggunakan K13 dan di sesuaikan dengan Kompetensi Dasar (KD) apa yang di ajarkan untuk siswa dan disini guru berpatokan menggunakan RPP di saat menagajar.

Penggunaan Kurikulum adalah proses dimana guru harus lebih produktif untuk siswanya sehingga pola tingkat belajar siswa bisa berubah dan permbaharuan kurikulum itu sangat berpengaruh pada siswa karena siswa harus

lebih kritis dalam memahami pelajaran. Hal ini sesuai hasil Wawancara dengan Guru MTs. Muhammadiyah Lempangang yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya SKTB ada beberapa siswa yang belum mampu mereka tetap naik, dan menyebabkan mereka kewalahan pada materi pembelajaran selanjutnya, apalagi dengan adanya perubahan pada kurikulum yang menuntut siswa lebih kritis lagi dalam memahami pembelajaran yang biasanya hal inilah yang membuat beberapa siswa kewalahan yang sebenarnya dengan model pembelajaran ini memiliki tujuan yang baik yaitu menantang siswa untuk lebih berpikir lagi dalam memecahkan sebuah soal dalam pelajaran”(Hasil Wawancara dengan HI, 17 Juli 2018).

Penggunaan Kurikulum baru sangat berpengaruh dengan tingkat kerajinan siswa karena disini siswa di ajarkan untuk lebih berfikir kritis dalam memecahkan suatu masalah dalam proses belajar mengajar dan guru juga sudah memberikan motivasi untuk siswa sehingga mereka tetap rajin seperti pada saat belum diterapkannya Sistem Kelas Tuntas berkelanjutan (SKTB).

Penggunaan kurikulum baru ketika akan di gunakan maka guru di sekolah melakukan pelatihan atau Workshop sebelum melaksanakan kurikulum baru tersebut dan guru harus mempelajari betul apa maksud dari kurikulum tersebut. Hal ini sesuai Hasil Wawancara dengan Salah satu Guru MTs. Muhammadiyah Lempangang yang mengatakan bahwa:

“Ketika sudah ada kurikulum baru maka seorang guru itu harus mempelajari dulu kembali atau dalam istilah workshop atau pelatihan bahwa seperti ini maunya kurikulum yang baru ini sama halnya dalam pengimputan nilai raport kita harus adakan pelatihan karena kita tidak bisa mengganggu kurikulum itu ketika belum melaksanakan yang namanya pelatihan atau workshop dan guru siap menerima kurikulum apa pun yang jelas kita harus dulu mengadakan pelatihan” (Hasil wawancara dengan HI, Tanggal 18 Juli 2018).

Dapat Disimpulkan bahwa Penggunaan Kurikulum Baru dalam melakukan sosialisasi atau Pelatihan di sekolah dengan Bentuk sosialisasinya yaitu dengan

mengadakan workshop, namun tidak semua guru mengikuti kegiatan tersebut tapi ada perwakilan. Disini Sekolah memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Selain itu, fungsi adanya pelatihan atau workshop dan Komite Sekolah adalah memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan serta mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan.

Berdasarkan Observasi yang telah diperoleh selama dilapangan, bahwa pengelolaan kurikulum di sekolah terkait masalah implementasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan SKTB bahwa Guru melakukan pengajaran sesuai dengan RPP yang sudah di buat dan sebelum melakukan pengajaran atau berlakunya kurikulum baru maka sebagian Guru-guru disekolah melakukan Workshop atau Pelatihan untuk memberikan masukan atau pertimbangan sebelum Kurikulum baru di tetapkan.

2. Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan sangat berpengaruh dengan pembelajaran siswa karena Inovasi pendidikan harus memperhatikan bagaimana keseimbangan personil pendidik, tenaga administrasi dengan siswa yang ditangani untuk di didik dan disiplin dengan baik karena kedisiplinan siswa juga tergantung dengan bagaiman kebijakan yang berlaku di sekolah. Terkait dengan Hasil Wawancara wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa yang mengatakan bahwa:

“Hambatan yang pertama adalah ketidaksiapan siswa dalam melakukan remedial karena mungkin tidak memperhatikan pelajaran

atau siswa yang malas tidak fokus dan tiba-tiba di panggil remedial pada pelajaran yang di remedialkan oleh karena itu pendidik/ Guru Memberikan Motivasi supaya siswa mau belajar untuk menuntaskan nilai-nilainya yang bermasalah dan yang tidak tuntas wajib di ulang/remedial sesuai dengan Nilai KKN dengan cara memberikan tugas mau dalam bentuk tulisan atau Lisan'' (Hasil wawancara dengan SM, Tanggal 20 Juli 2018).

Dari Hasil wawancara di atas bahwa Adanya Sistem kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) membuat guru harus lebih bekerja keras lagi dalam memberikan perhatian dan bimbingan kepada siswanya, karena sistem ini sudah tidak mengenal lagi tinggal kelas jadi diperlukan perhatian yang lebih besar lagi terhadap siswa dalam mencapai ketuntasan. banyaknya pendidik dan tenaga pendidikan sangat berpengaruh terhadap kerajinan siswa. adapun hasil wawancara dari salah satu Guru MTs. Muhammadiyah Lempangan yang mengatakan bahwa:

''Kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyadari kekurangannya sehingga siswa betul-betul memperhatikan keadaanya bahwasahnya mereka berfikir bahwa ternyata guru juga memperhatikan keadaan dan memberikan motivasi sesuai dengan apa yang di targetkan oleh guru bisa dia capai sehingga siswa betul-betul memperhatikan pelajarannya''(Hasil Wawancara dengan CK, Tanggal 25 Juli 2018).

Peran Pendidik harus betul-betul memperhatikan siswanya dalam memberika motivasi agar mereka bisa serius dalam belajar sehingga siswa cepat dalam melakukan pelajarannya disekolah dan keseriusan siswa dalam mengikuti pelajaran harus dijaga dengan baik sehingga siswa tersebut tidak bosan dengan proses belajar mengajar setiap hari.

Peningkatan Mutu Pendidik harus lebih efektif dalam melakukan proses belajar mengajar mulai dari kehadirannya, ke aktifan dalam kelas dan guru harus memperhatikan dengan baik. Hal ini sesuai Hasil Wawancara dengan Salah satu Guru MTs. Muhammadiyah Lempangan yang mengatakan bahwa:

“Peningkatan mutu Guru itu maka dia akan memperhatikan keadaan siswa misalnya siswa itu yang bermasalah maka dia akan memperhatikan masalah tersebut kemudian dia menindaklanuti apa bila ada siswa yang tidak menuntaskan nilainya maka dia akan di berikan remedial utnuk memperbaiki Nilainya sesuai dengan yang bermasalah kemudian mengenai siswa yang tinggal kelas sebenarnya mereka tidak tinggal kelas karena sudah di terapkan SKTB cuman mereka memperbaiki nilai yang bermasalah sebelum pindah ke kelas berikutnya kemudian kehadirannya juga harus mencapai 80% .”(Hasil Wawancara dengan CK, 18 Juli 2018).

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendidik/ Guru sangat berperan penting dalam kedisiplinan karena siswa harus menuntaskan semua Pelajaran sebelum naik kelas beberapa siswa yang merasa diuntungkan dengan kebijakan ini dan membuat mereka kurang serius dan santai dalam pembelajaran tanpa memikirkan kualitas pembelajaran yang ada pada dirinya, selain itu dengan adanya kebijakan ini seperti adanya penekanan siswa harus tuntas walaupun ada diantara mereka belum mampu, disinilah dituntut peran guru yang harus bekerja keras dalam pelaksanaan SKTB ini bukan hanya melakukan peningkatan kelulusan tapi peningkatan kualitas.

Berdasarkan Observasi yang telah diperoleh selama dilapangan. Bahwa selama Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Implementasikan banyak perubahan yang terjadi mulai dari kedisiplinan siswa begitupun dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Peran pendidik sudah sesuai dan sudah memberikan keringanan pada siswa terkait masalah ketuntasan Mata pelajaran yang bermaslah dan guru-guru tidak memberatkan siswa dalam pelaksanaan remedial akan tetapi guru-guru selalu memberikan motivasi agar siswa tersebut serius dalam pelaksanaan remedial sampai betul-betul tuntas.

3. Pengelolaan sarana prasarana sekolah

Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa yang mendukung semua proses pembelajaran di sekolah. Terkait dengan Hasil Wawancara wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan MTs. Muhammadiyah Lembang Kab. Gowa yang mengatakan bahwa:

“Pertama membuat ruang belajar bersih dan nyaman kemudian memaksimalkan alat peraga pembelajaran di sekolah terkait alat peraga yang tidak berkualitas tapi masih tetap dipakai di sekolah karena tidak ada lagi yang lain mau dipakai jadi tetap itu saja apapun yang ada di sekolah”(Hasil wawancara dengan SM, 17 Juli 2018).

Dari Hasil Wawancara di atas juga didukung dengan Hasil Wawancara Salah satu Guru MTs. Muhammadiyah Lembang yang mengatakan bahwa:

“Guru menindaklanjuti kemalasan siswa dengan cara memberika kenyamanan pada siswa di sekolah sehingga mereka bisa rajin ke sekolah Karena sekarang anak-anak banyak yang malas-malas ke sekolah sehingga nilainya bermasalah nah disini perannya guru untuk mengatasi kemalasan pada siswa dan kami sangat memberika motivasi untuk siswa sehingga mereka ada semangat belajar di sekolah maupun di rumah.”(Hasil wawancara dengan HI, Tanggal 9 Juli 2018).

Sarana dan prasarana juga berpengaruh terhadap Penyelenggaraan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan dan sekolah harus menyediakan fasilitas yang memadai sehingga semangat belajar siswa itu ada. Hal ini sesuai Hasil

Wawancara dengan Kepala Madrasah MTs. Muhammadiyah Lempangang yang mengatakan bahwa:

“Sampai pada saat ini belum ada fasilitas kami belum ada bantuan fasilitas baru pelatihan dan sosialisasi masalah bantuan fasilitas dari Pemerintah/ Dinas Yang terkait belum ada”.(Hasil wawancara dengan HS, 17 Juli 2018).

Dari Hasil Wawancara dapat di simpulkan bahwa Sarana prasarana di sekolah berkaitan dengan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pendidikan hal ini menjadi tugas pemerintah dalam peningkatan dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan karena Minimnya sarana dan prasarana ini dapat menghambat dalam Sistem kelas Tuntas Berkelanjutan SKTB. Dengan adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang baik maka dapat menarik minat siswa untuk lebih rajin lagi belajar begitu pula dengan guru dapat menggunakan metode yang kreatif atau lebih baik lagi dalam proses pembelajaran dan Masalah belajar melalui teknologi juga sudah bisa di Akses dimana-mana oleh siswa dan Guru.

Manajemen yang di gunakan di MTs. Muhammadiyah lempangang kab. Gowa adalah manajemen tertutup karena mereka berdiri sendiri dan masalah fasilitas juga belum lengkap karena tidak ada bantua dari pemerintah yang bersangkutan dan berasaskan dari sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran jadi MTs. Muhammadiyah Lempangang sesuai dengan hasil wawancara di atas menggunakan manajemen tertutup.

Berdasarkan Observasi yang telah diperoleh selama dilapangan. Bahwa sarana dan prasarana yang ada di MTs. Muhammadiyah Lempangang hanya menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dan guru hanya berkreasi bagaimana

sehingga siswa bisa termotivasi belajar dengan membersihkan ruangan-ruangan menjaga kebersihan sekolah sehingga mereka nyaman dalam mengikuti pelajaran setiap hari dan tidak ada bantuan-bantuan dana dari Pemerintah jadi MTs. Muhammadiyah hanya menggunakan fasilitas yang ada saja. Guru sudah menjalankan tugas dengan baik, namun kendalanya beberapa persen siswa ada yang malas karena faktor lingkungan dan dorongan orangtua yang masih kurang, serta sarana sekolah yang masih minim. Guru mau menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi untuk memancing minat belajar siswa, namun sarana yang kurang maka hal ini biasanya menjadi kendala disekolah.

Tabel: 4.1 Jumlah Siswa dan Jumlah Kelas /Rombel

Tahun Kelas	2015 / 2016			2016 / 2017			2017 / 2018		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
I (VII)	32	31	63	38	40	78	26	33	59
II (VIII)	21	23	44	31	30	61	42	29	71
III (IX)	19	15	34	21	22	43	35	40	75
T o t a l	72	69	141	90	92	182	103	102	205
Jumlah Kelas/Rombel	5			6			6		

Berdasarkan dengan Tabel di atas Jumlah siswa di MTs. Muhammadiyah Lempangang setiap tahun mengalami peningkatan dan Tempat Ruang belajar antara Perempuan dan Laki-laki berbeda ruangan akan tetapi walaupun siswa meningkat tetapi ruangnya masih tetap sama dan disisi lain fasilitas untuk

belajar kondisinya masih kurang memadai dan perlu peningkatan atau tambahan ruangan untuk siswa di MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa.

Tabel 4:2 Sarana dan Prasarana MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa

No	Sarana dan Prasarana	Ket
1	Perpustakaan	1
2	Laboratorium	1
3	Ruang Guru,Tata Usaha dan Kepala madrasha	1 ruangan
4	Lapangan	1
5	Ruang Kelas	4 ruang kelas
6	Mushalla	1
7	Tempat Parkir	1
8	WC	3 Buah
Jumlah		13 ruangan

Berdasarkan dengan tabel di atas bahwa sarana dan prasarana masih perlu di tambah dan kondisinya kurang memadai untuk menyelenggarakan Sistem Kelas Tuntas berkelanjutan karena sarana dan prasaran juga berpengaruh terhadap kelancaran proses belajar mengajar dan disini ruanagn guru, ruang kepala madrasha dan tata Usaha masih dalam 1 ruangan dan seharusnya setiap ruangan harus beda-beda misalnya 1 ruangan kantor begitupun dengan Ruang tata Usaha dan ruang Guru kemudian terkait masalahWC masih kurang memadai dan perlu

penambahan di sekolah. Terkait dengan sarana prasarana yang masih kurang memadai maka pemerintah dan sekolah harus memperhatikan hal tersebut.

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran

Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran merupakan suatu kebutuhan pokok dimasa sekarang sehingga sekolah pun harus ikut menerapkan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam pembelajaran akan tetapi pada kenyataannya tidak semua sekolah mampu menerapkan Teknologi Informasi dan komunikasi sebagai basis pada sistem pembelajarannya di sebabkan dengan beberapa faktor untuk itu diperlukan suatu manajemen dan strategi yang tepat agar penerapan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di sekolah dapat sejalan dengan tujuan yang telah di rumuskan di sekolah. Hal lain yang dikatakan oleh salah satu Guru bahwa pengaruh perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran sistem kelas tuntas berkelanjutan SKTB di MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa yang mengatakan bahwa:

“Pengaruhnya itu sangat cukup signifikan malah kami memandang kedepannya ini MTs. Muhammadiyah Lempangang harus Go Online harus masuk ke teknologi bahkan pembelajaran sistem online akan menunjang sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) Karena sistem online bisa membuat siswa untuk berkomunikasi secara langsung kepada Guru yang bersangkutan siswa harus di perkenalkan dengan teknologi karena itu sangat mendukung dan guru harus menyesuaikan karena siswa dapat ketinggalan dengan teknologi yang sekarang jadi siswa mau tidak mau harus mengenal yang namanya Teknologi sehingga bisa menyesuaikan karena siswa dapat memanfaatkan teknologi untuk belajar, cari tugas Dll di sekolah ini walaupun jauh dari kota kita tetap harus memperkenalkan Teknologi pada siswa sehingga mereka tidak ketinggalan dan mempunyai wawasan yang luas di luar dari apa yang di berikan guru”(Hasil Wawancara dengan SS, Tanggal 23 Juli 2018).

Hasil Wawancara di atas juga didukung dengan Hasil Wawancara Salah satu Guru MTs. Muhammadiyah Lempangang yang mengatakan bahwa:

“Karena saat ini siswa tanpa diberikan di sekolah untuk memperkenalkan teknologi mereka sudah banyak yang tau karena di lingkungan rumah mereka masing-masing sudah menggunakan teknologi jadi kita tinggal mengarahkan sehingga mereka bisa menggunakan teknologi dengan baik sebagai mana mestinya ya dengan digunakan untuk belajar lewat Teknologi tpi di sekolah juga masih biasa menggunakan manual dalam proses belajar mengajar.”(Hasil wawancara dengan HI, Tanggal 9 Juli 2018).

Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran bisa digunakan disekolah sehingga bisa mempermudah siswa dan bisa mengenal dunia maya dan disini kontrolin pendidik harus ketat sehingga siswa tidak ada yang menyalahgunakan Teknologi akan tetapi di gunakan untuk keperluan dalam proses belajar mengajar. Hal ini sesuai Hasil Wawancara dengan Salah satu Guru MTs. Muhammadiyah Lempangang yang mengatakan bahwa:

“Sekarang siswa harus mengenal teknologi karena bisa mempermudah untuk mencari tugas-tugasnya dan mengirim tugas juga lewat online agar lebih muda dan cepat akan tetapi dalam proses belajar mengajar masih menggunakan manual karena fasilitas yang tidak memadai.”(Hasil wawancara dengan HI, 17 Juli 2018).

Adanya teknologi Informasi dan komunikasi sekarang semakin muda untuk berkomunikasi dengan siapa saja dan tugas-tugas disekolah juga sudah mudah dan disini peran semua Guru dan orang tua siswa sangat berperan sehingga siswa tidak menyalahgunakan teknologi tersebut. Hal ini sesuai Hasil Wawancara dengan Salah satu Guru MTs. Muhammadiyah Lempangang yang mengatakan bahwa:

“Bagus sudah ada Teknologi yang canggih Online jadi kami tidak susah-susah lagi mencari kalau ada tugas karena langsung di cari di Internet dan guru juga sudah ada yang bisa mengirim tugas lewat internet/ Email untuk lebih muda.”(Hasil Wawancara dengan RO, 20 Juli 2018).

Dari Hasil Wawancara dapat disimpulkan bahwa Teknologi Informasi dan komunikasi dalam Pembelajaran merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Dengan mengenal teknologi Pembelajaran remedial yang dikembangkan adalah pembelajaran remedial berkelanjutan yang dimaksudkan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar sejak awal bisa mencari tugasnya lewat Internet Setiap guru dituntut untuk senantiasa mencermati setiap siswanya yang mengalami kesulitan belajar sejak awal, sehingga dapat menentukan langkah antisipasi sebelum dilaksanakan ujian/ulangan.

Berdasarkan Observasi yang telah diperoleh selama dilapangan. Bahwa dalam proses belajar mengajar masih menggunakan manual dalam mengajar dan siswa juga banyak yang malas belajar karena mereka sudah mengenal yang namanya teknologi sehingga minat belajar sudah tidak ada karena mereka sudah mengetahui cara mencari tugas dll langsung Instan di sisi lain mereka juga tidak ketinggalan akan tetapi disini guru harus mengimbangi siswa sehingga mereka tidak menyalahgunakan Teknologi yang sekarang dan harus diberikan motivasi oleh guru-guru di sekolah.

5. Pengelolaan Peserta Didik

Pengelolaan Peserta didik merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut. Secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan

peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Terkait dengan Hasil Wawancara Kepala Madrasah MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa yang mengatakan bahwa:

“Mungkin secara tidak langsung kita melakukan pembinaan kedisiplinan pendidik dengan menjadikan guru sebagai penjemput siswa di pagi hari jam 6:30 guru sudah berdiri di gerbang sekolah untuk menjemput siswa terkait dengan itu adalah ketika ada pembelajarannya yang tidak tuntas maka siswa yang cari guru untuk menuntaskan pembelajarannya setelah itu dia kerja sama kapan jadwalnya untuk menuntaskan pembelajarannya ada yang personal dan ada pula yang di kelompokkan berdasarkan dengan jumlah siswa yang tidak tuntas”(Hasil Wawancara dengan HS, 16 Juli 2018).

Dari Hasil Wawancara di atas juga didukung dengan Hasil Wawancara Salah satu Guru MTs. Muhammadiyah Lempangang yang mengatakan bahwa:

“Siswa yang tidak tuntas nilai-nilainya tetap naik Kelas tetapi dengan syarat mereka harus mengulang kembali ketemu dengan guru-gurunya untuk mengulangi mata pelajaran yang belum tuntas jadi setelah tuntas nilainya maka mereka akan langsung di naik kan ke kelas berikutnya”(Hasil Wawancara dengan FI,17 Juli 2018).

Pengelolaan Peserta didik akan di laksanakan dengan baik dan sesuai dengan peran guru masing-masing, guru akan terus menerus memberikan pengulangan pada siswa yang tidak tuntas Pelajarannya. Hal ini sesuai Hasil Wawancara dengan Kepala Madrasah MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa yang mengatakan bahwa:

“Termasuk proses belajar mengajar, guru maksimal dengan mengandalkan kegiatan remedial secara terus – menerus sehingga tidak ada anak yang tidak layak tinggal kelas , sehingga di akhir tahun semua memenuhi syarat untuk naik kelas”.(Hasil Wawancara dengan HS, 16 Juli 2018).

Proses penuntasa pelajaran terus-menerus dilakukan oleh Guru untuk menuntaskan pelajaran sampai betul-betul tuntas yang bermasalah. Hal ini sesuai Hasil Wawancara dengan Salah Satu Siswa Kelas 3 MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa yang mengatakan bahwa:

“Ketika ada mata pelajaran yang tidak tuntas atau nilai kami tidak mencapai nilai minimal standar mata pelajaran , guru memberikan remedial kepada kami sampai kami mencapai nilai minimal.”(Hasil Wawancara dengan RA, 18 Juli 2018).

Dari Hasil Wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Pengelolaan Peserta didik bahwa dalam Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) disini sebagai motivator siswa dan peserta didik sebagai subjek dari kegiatan pendidikan yang dilaksanakan. Sistem ini sangat menjunjung tinggi keberadaan peserta didik dan fokus pembelajaran ini bukan pada guru melainkan pada peserta didik. Kemajuan peserta didik sangat bertumpuh dan ditentukan oleh ketekunan dan usaha yang dilakukanya secara individual. Jadi ketika peserta didik itu tidak tekun atau tidak serius dalam pembelajaran apalagi ketika mereka malas ke sekolah maka hal ini sangat sulit dalam pencapaian keberhasilan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB).

Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai Kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Pembelajaran remedial yang dikembangkan adalah pembelajaran remedial berkelanjutan yang dimaksudkan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar sejak awal. Setiap guru dituntut untuk senantiasa mencermati setiap siswanya yang mengalami kesulitan belajar sejak

awal, sehingga dapat menentukan langkah antisipasi sebelum dilaksanakan ujian/ulangan.

1. Langkah yang ditempuh oleh guru dalam pemberian remedial berkelanjutan di Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) adalah:

1. Menemukan masalah
2. Mengidentifikasi permasalahan
3. Analisis masalah
4. Menentukan alternatif tindakan
5. Menyusun rencana remedial
6. Melaksanakan remedial
7. Mengevaluasi hasil remedial
8. Menindaklanjuti hasil remedial

Setelah dilakukan langkah- langkah diatas namun terdapat peserta didik yang tidak mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Maka pendidik dapat memberikan perlakuan berupa:

1. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Pembelajaran ulang dapat disampaikan dengan cara penyederhanaan materi.
2. Pemberian bimbingan secara khusus, memberikan bimbingan perorangan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan.
3. Pemberian tugas-tugas secara khusus, dalam rangka menerapkan prinsip pengulangan tugas-tugas khusus perlu diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam belajar.

4. Pemanfaatan tutor sebaya, tutor sebaya adalah teman sekelas yang memiliki kecakapan yang lebih dapat dimanfaatkan dalam membantu temanya yang masih kesulitan.

Dengan adanya upaya remedial diatas menyebabkan dengan pada akhir tahun , KTB tidak mengenal adanya peserta didik yang tinggal kelas. Setiap peserta didik tidak tinggal kelas, dan melanjutkan pelajarannya di kelas baru pada tahun ajaran baru.

Berdasarkan Observasi yang telah diperoleh selama dilapangan. Secara konseptual Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) adalah pendekatan pendidikan yang memberikan perhatian kepada upaya membantu peserta didik dalam mencapai ketuntasan belajar. Ketuntasan tersebut dilakukan dalam proses pembelajaran sejak awal semester dan akhir semester atau awal tahun. sampai akhir semester/tahun, dan Pada setiap pertemuan tersebut dilakukan penilaian hasil belajar dan diberikan remedial bagi mereka yang belum mencapai ketuntasan dalam menguasai kompetensi untuk pertemuan tersebut. Pemberian remedial dapat dilakukan secara individual, kelas, dan kelompok. Pada akhir tahun sehingga tidak peserta didik yang tinggal kelas.

C. Faktor- Faktor yang mendukung Pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa

Dalam implementasi Sistem kelas Tuntas berkelanjutan (SKTB) terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya, baik faktor pendukung maupun penghambat. Adapun faktor-faktor yang mendukung

pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas berkelanjutan (SKTB) yaitu Sebagai Berikut:

a. Faktor Pendukung Pelaksanaan SKTB

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) diantaranya SKTB telah menjadi program Kabupaten Gowa dengan adanya peraturan daerah No. 10 Tahun 2013. Terkait dengan Hasil Wawancara kepala Madrasah MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa yang mengatakan bahwa:

“Bahwa muhammadiyah itu sudah memiliki kesepakatan dengan pemerintah kabupaten Gowa kalau seluruh perguruan dibawah naungan muhammadiyah itu mengikuti sistem pendidikan yang di berlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa di antaranya adalah Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB). Kebijakan SKTB ini telah berlaku di semua sekolah di Kabupaten Gowa, terlebih lagi kebijakan ini telah memiliki peraturan daerah dan telah menjadi program daerah Kabupaten Gowa, dimana semua sekolah harus melaksanakannya” (Hasil Wawancara dengan SH 16 Juli 2018).

Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Gowa yaitu Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) bahwa semua sekolah di Kab. Gowa harus menerapkannya dan sudah tidak ada sistem tinggal kelas. Hal ini dibenarkan dengan adanya pernyataan dari Guru MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa yang mengatakan bahwa:

“Dari segi regulasi pemerintah daerah dengan adanya peraturan daerah No.10 Tahun 2013 yang dimana SKTB sudah menjadi program daerah yang telah dijalankan pada tingkat sekolah SD, SMP, dan SMA baik itu negeri dan swasta” (Hasil Wawancara dengan NS, Tanggal 16 Juli 2018).

Penulis menyimpulkan bahwa Faktor Pendukung Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) sudah menjadi kebijakan dari pemerintah daerah yang

ditetapkan melalui peraturan daerah No. 10 Tahun 2013, jadi SKTB ini telah diterapkan disemua sekolah dan sudah diterima baik dari Guru atau siswa dalam Pelaksanaannya di kabupaten Gowa baik untuk SD, SMP, dan SMA tanpa terkecuali.

Berdasarkan Observasi yang telah diperoleh selama dilapangan. Bahwa faktor pendukung Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di MTs. Muhammadiyah lempangang Kab. Gowa sudah mempunyai kesepakatan oleh pemerintah bahwa seluruh sekolah di Kab. Gowa dibawah naungan MUhammdiyah sudah mengikuti Kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah termasuk Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan(SKTB).

1. Semua Stakholder Pendidikan Sudah merespon dengan baik

Adanya respon dari sekolah baik itu guru dan siswa dalam pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB). Berdasarkan Pernyataan dari Guru yang Mengatakan Bahwa:

“SKTB adalah sebuah sistem di mana siswa diberikan pelayanan prima oleh gurunya , ketika seorang siswa tidak tuntas diberikan pengayaan dan redmedial. Remedial itu tidak mengenal waktu , baik 2 atau 3 kali diupayakan seorang siswa mencapai ketuntasan”(Hasil Wawancara dengan HI, 18 Juli 2018).

Hal ini dibenarkan dengan adanya pernyataan dari Siswa Kelas 2 MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa yang mengatakan bahwa:

“Sistem ini menurut saya sudah bagus karena kita sebagai siswa tidak harus mengulang lagi satu tahun, namun hanya mengulang pelajaran yang tidak tuntas saja.” (Hasil Wawancara dengan RO, 19 Juli 2018).

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) telah mendapatkan respon yang baik dan telah

diterima, baik dari guru maupun siswa itu sendiri dalam pelaksanaannya/Implementasinya.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan SKTB

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB). Terkait dengan Hasil Wawancara kepala Madrasah MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa yang mengatakan bahwa:

1. Pemahaman Masyarakat yang keliru tentang SKTB

Pemahaman masyarakat yang masih bervariasi terhadap kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) ini. Masih adanya beberapa masyarakat yang tidak setuju terhadap kebijakan ini, menganggap kebijakan ini sangatlah menguntungkan bagi siswa apalagi bagi siswa yang malas. Terkait dengan Hasil Wawancara kepala Madrasah MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa yang mengatakan bahwa:

“contoh orang tua menganggap dengan sistem itu otomatis naik kelas tanpa mereka mengetahui bahwa ada persyaratan kehadiran di bawah 80% maka tetap tidak bersyarat naik kelas kemudian ketuntasan pembelajaran ada orang tua yang tidak paham kalau anaknya harus menuntaskan Nilainya sehingga ketika di dikembalikan ke kelas sebelumnya mereka mengatakan kenapa anaknya di dudukkan di kelas sebelumnya padahal untuk mengulang atau menuntaskan pelajarannya salah satu hambatannya” (Hasil Wawancara dengan HS, Tanggal 16 Juli 2018).

Hal ini dibenarkan dengan adanya pernyataan dari Siswa MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya SKTB ada beberapa siswa yang belum mampu mereka tetap naik, dan menyebabkan mereka kewalahan pada materi pembelajaran selanjutnya, apalagi dengan adanya perubahan pada kurikulum yang menuntut siswa lebih kritis lagi dalam memahami pembelajaran yang biasanya hal inilah yang membuat beberapa siswa kewalahan yang sebenarnya dengan model

pembelajaran ini memiliki tujuan yang baik yaitu menantang siswa untuk lebih berpikir lagi dalam memecahkan sebuah soal dalam pelajaran”(Hasil Wawancara dengan NS, Tanggal 17 Juli 2018).

Penulis menyimpulkan bahwa masih adanya beberapa masyarakat Gowa yang tidak mendukung kebijakan ini, selain itu juga terhambat pada siswa yang dapat menyebabkan kewalahan dalam memahami pembelajaran selanjutnya. Padahal dalam mencapai keberhasilan sebuah kebijakan dibutuhkan dukungan dari masyarakat dan semua pihak yang terlibat di dalam sebuah kebijakan .

2. Perangkat pendukung yang tidak maksimal

Perangkat Pendukung tidak maksimal sehingga bisa terkendala oleh sarana dan prasaran di sekolah dalam pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Sarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pelaksanaan SKTB masih terdapat sekolah yang masih memiliki sarana dan prasarana yang masih minim. Sesuai dengan Hasil Wawancara kepala Madrasah MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa yang mengatakan bahwa:

“Di antaranya adalah fasilitas karena SKTB termasuk penguatannya adalah remedial sementara fasilitas kita itu kurang mendukung dari segi fasilitas adalah sistem SKTB sementara khusus di madhrasa kami tidak di dukung dengan fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai di antaranya adalah kelengkapan laboratorium pembelajaran Penuntasan dari tingkat praktikumnya misalnya itu yang terhambat”(Hasil Wawancara dengan HS, Tanggal 16 Juli 2018).

Hasil Wawancara di atas juga didukung dengan Hasil Wawancara Salah satu Guru MTs. Muhammadiyah Lempangang yang mengatakan bahwa:

“Beberapa hal yang menjadi kendala dalam Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) yaitu minat belajar siswa yang kurang, dorongan orangtua juga yang masih kurang, dan sarana pendidikan yang masih minim”(Hasil wawancara dengan SS, Tanggal 3 Agustus 2018).

Penulis menyimpulkan, berkaitan dengan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pendidikan hal ini menjadi tugas pemerintah dalam peningkatan dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan karena Minimnya sarana dan prasarana ini dapat menghambat dalam SKTB. Dengan adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang baik dapat menarik minat siswa untuk lebih rajin lagi belajar begitu pula dengan guru dapat menggunakan metode yang kreatif atau lebih baik lagi dalam proses pembelajaran.

3. Keterbatasan pendanaan

Keterbatasan Pendanaan sangat berpengaruh besar terhadap pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas berkelanjutan (SKTB) karena dimana fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah terkadang juga tidak sesuai dengan jumlah siswa dan sudah tidak memadai lagi untuk di pakai. Terkait dengan Hasil Wawancara kepala Madrasah MTs. Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa yang mengatakan bahwa:

“MTs. Muhammadiyah Lempangang pembiayaannya dari dana Bos sementara dana Bos ini hanya bisa membiayai kegiatan rutin dan honor harian Guru untuk penuntasan remedial secara maksimal ini kita masih kepayahan dalam penganggaran karena guru kalau dia harus tinggal melakukan remedial di sekolah kita harus mengerti untuk konsumsinya dan penghargaan kepadanya karena di luar dari jam kerjanya”(Hasil Wawancara dengan HS, Tanggal 4 Agustus 2018).

Dari Hasil Wawancara di atas juga didukung dengan Hasil Wawancara

Salah satu Guru MTs. Muhammadiyah Lempangang yang mengatakan bahwa:

“Guru sudah menjalankan tugas dengan baik, namun kendalanya beberapa persen siswa ada yang malas karena faktor lingkungan dan dorongan orangtua yang masih kurang, serta sarana sekolah yang masih minim. Guru mau menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi untuk memancing minat belajar siswa, namun fasilitas yang kurang maka hal ini biasanya menjadi kendala bagi kami”(Hasil Wawancara dengan AA, Tanggal 4 Agustus 2018).

Disini dapat disimpulkan bahwa keterbatasan pendanaan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Pihak sekolah harus melakukan kerja sama sehingga memenuhi fasilitas-fasilitas yang ada disekolah dimana agar siswa dapat meningkatkan semangat belajar seperti yang di inginkan oleh Pendidik/ Guru di sekolah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Salah satu kebijakan program pendidikan diterapkan di Kabupaten Gowa adalah SKTB. Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) disosialisasikan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan SKTB dengan dilaksanakannya pada 50 sekolah rujukan SKTB dan pada 2013 dilaksanakan secara keseluruhan disemua tingkatan sekolah SD, SMP/MTS dan SMA/SMK di Kabupaten Gowa. Pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) saat ini belum berjalan secara optimal masih dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama masih adanya pemahaman yang bervariasi mengenai kebijakan ini. Peran pemerintah dalam SKTB yaitu mensosialisasikan kebijakan ini, melaksanakan workshop, dan pelatihan juga masih perlu ditingkatkan apalagi kegiatan pembimbingan kepada guru berkaitan pelaksanaan teknis. Hubungan antara tahap pembaharuan dan implementasi sesungguhnya sangat interaktif. Proses yang terjadi selama tahap pembaharuan dapat bermakna atau dapat membingungkan, melahirkan komitmen atau bahkan aleniasi, serta hal-hal lain yang dipengaruhi oleh pembaharuan Inovasi. Cukup banyak inovasi yang dikenalkan kesukarannya biasanya terjadi dalam menentukan kesepadanan antara kebutuhan lokal dengan sumber-sumber inovasi yang tersedia. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Inovasi

pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang efektif.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan penghambat terkait masalah implementasi Sistem kelas Tuntas Berkelanjutan SKTB. Faktor Penghambat banyaknya masyarakat yang tidak mengerti atau tidak paham tentang pelaksanaan SKTB. Pemahaman Masyarakat yang keliru tentang sistem SKTB Perangkat pendukung dari sistem yang tidak maksimal dan Keterbatasan pendanaan. Faktor Pendukung Dari segi regulasi pemerintah daerah dengan adanya peraturan daerah No.10 Tahun 2013 yang dimana SKTB sudah menjadi Program Daerah. Respon stakholder pendidikan seperti sekolah merespon dengan baik Mendapatkan dukungan dari masyarakat/orangtua siswa

B. Saran

1. Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan SKTB ini lebih ditingkatkan dalam pengawalan dan pengawasannya dilapangan agar selain memberikan kenaikan tingkat kelulusan yang tinggi namun juga tetap memperhatikan kualitas.
2. Pemerintah perlu Memaksimalkan sosialisasi untuk memberikan pemahaman mengenai sistem ini yang sebenarnya, agar tidak terjadi lagi kekeliruan dalam memahami sistem ini
3. Pemerintah perlu meningkatkan dan mengadakan pelatihan khusus kepada guru mengenai sistem ini tentang pelaksanaan teknisnya di

lapangan/sekolah, karena masih ada beberapa guru yang belum paham mengenai pelaksanaannya.

4. Guru sangat diperlukan dalam memotivasi diri dan siswanya untuk sadar dalam menjalankan kebijakan pendidikan ini bukan hanya memikirkan ketuntasan semata melainkan memikirkan bagaimana kualitas siswanya.
5. Pemerintah perlu melakukan peningkatan dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah, karena dalam mencapai keberhasilan ini untuk menarik minat belajar siswa diperlukan sarana dan prasarana pendukung dalam pembelajaran
6. Untuk para orang tua siswa dan masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini, apalagi orang tua siswa sangat diperlukan dalam memotivasi dan membimbing anaknya dalam belajar jangan menyerahkan secara total kepada pihak sekolah.
7. Untuk pelaksanaan kegiatan remedial idealnya bukan hanya pemberian soal saja untuk mencapai ketuntasan, melainkan dibimbing secara khusus sampai peserta didik itu paham dengan materi remedialnya.
8. Diperlukannya kesadaran dan kerjasama setiap stakeholder dalam menjalankan kebijakan utamanya dalam hal mencapai peningkatan kualitas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. 2012. *Hukum Tata pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ali, Mohammad. 2009. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Jakarta: Imtima.
- Al-Samarrai, S. 2013. *Local Governance and Education Performance: a Survey of the Quality of Local Education Governance in 50 Indonesian Districts. Human Development*. Jakarta: World Bank.
- Ayatollah, Hidayat 2014. *Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, Edukasi Mitra* Grafika: Makassar.
- Dikorda. 2013. *Buku Panduan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan*. Gowa: Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa.
- Evan, Suyono. 2015. Skripsi: *Inovasi Kebijakan Pendidikan Di Kota Palopo* Universitas Hasanuddin Makassar.
- Fontana, Avanti, 2011. *Individual Conceptions Of Publik Service Mutifation "Publik Administration Review"*: Jakarta.
- Hamijoyo, Santoso. 2010. *Inovasi Pendidikan (Meninjau Beberapa Kerangka Analisa untuk Penelitian dan Pelaksanaannya)*. Bandung Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Ibrahim. 2009. *Inovasi Pendidikan*. Jakarta. Proyek Pengembangang Lembaga pendidikan Tenaga Kependidikan, Ditjen Dikti. Depdikbud.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. 2011. *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahsyar, A. 2011. *Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2)*.
- Mesiono. 2012. *Inovasi Pendidikan*. Medan: Perdana Publisng
- Mety, Silfitrian. 2016. Skripsi: *Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Di Kabupaten Gowa*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Miles dan Huberman. 2012. *Teknik Analisis Data*. Jakarta: PT Gunung Agung.

- Miles, Matthew B. 2011. *Educational Innovation: The Nature of The Problem dalam Innovation in Education*, New York: Teachers College Press Columbia University.
- Muchlas, M. Tahir. 2017. Inovasi Program Kesehatan 24 Jam Dalam Mewujudkan *Good Health Care Governance* di Kabupaten Bantaeng. Otoritas : *Jurnal Ilmiah* Volume 2, Nomor 1, Desember 2017.
- Mulya S, Mulyani. 2015. Skripsi: Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pelaksanaan SKTB di SD Inpres Cambaya: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mustakim, M. dkk. 2013. Pemanfaatan Forum Komunikasi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sma Di Kabupaten Gowa. Jurnal Komunikasi Kareba, Volume 2 No. 3.**
- Mustari, N. 2011. Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik & Pemerataan Penyebaran Pendidik di Kabupaten Jeneponto. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Rasdi Ekosiswoyo, 2012. Kepemimpinan Kepala Sekolah Yang Efektif Kunci Pencapaian Kualitas Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan* Jilid 14 No. 2
- Risal Dzul Fadly, 2017. Perbedaan Motivasi Belajar Siswa antara Sekolah yang menerapkan SKTB dengan sekolah yang tidak menerapkan SKTB. *Jurnal Nalar Pendidikan* Volume 5 No.1
- Rusdiana. 2014. Konsep Inovasi Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia
- Sangkala. 2013. *Innovatif Government*, Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Sarundajang. 2012. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta selatan: Kata Hasta Pustaka.
- Sarnoto, A. Z. 2012. Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia. *Educhild*, 1(1).
- Satriawati 2017. Analisis Aspek Pedagogik Pelaksanaan Program Kelas Tuntas Berkelanjutan Di SD Ipres Japing Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Vol 1 Desember 2017.
- Sa'ud, Udin Syaefuddin. 2011. Inovasi Pendidikan, Bandung: Alfabeta.
- Siti Nurbaeti. 2014. *Skripsi: Pengawasan Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Tambang Galian C Di Kelurahan Lanna Kecamatan*

Parangloe Kabupaten Gowa. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Silfitriana, M. 2016. *Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa*. Universitas Hasanuddin

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabetha.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suharsaputra, Uhar. 2016. *Kepemimpinan Inovasi Pendidikan*. Bandung :Refika Aditama.

Sulistiawati. 2016. *Skripsi: Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Kesehatan 24 Jam Di Kabupaten Bantaeng*: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Suparno. 2017. *Inovasi Daerah untuk meningkatkan iklim investasi*. Jurnal Member administrasi.Vol 1. No 1.

Tatik Suryani. 2008. *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zuhriyati, Erni dkk. 2012. *Kepemimpinan Transformatif dalam Inovasi Pemerintah di Pemerintahan Kota Yogyakarta di Era Herry Zudianto*. Yogyakarta: J KSG.

Undang- undang

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB).

Internet

<http://arsip.kabar.news/gowa-siap-jadi-kabupaten-pendidikan-pertama-di-sulsel>. Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2018

RIWAYAT HIDUP



DEWI SARTIKA Lahir di Gowa Tanggal 01 Agustus 1996 anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Ayahanda Sulaeman dengan Ibunda Nurhayati. Penulis memulai Pendidikan di Sekolah Dasar SDI Inpres Tana Beru Kabupaten Gowa dan lulus Pada Tahun 2008. Kemudian Pada Tahun yang sama Penulis Melanjutkan sekolah di SMPN 1 Bontoramba Kabupaten Jeneponto lulus pada Tahun 2011 di Bangku Sekolah Pertama Penulis Aktif di Organisasi ekstrakurikuler yaitu Pramuka. Kemudian Penulis Melanjutkan Lagi di SMA Negeri 1 Binamu Kabupaten Jeneponto dan Lulus Pada Tahun 2014. dan Pada Tahun yang sama Penulis melanjutkan Kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar Mengambil Program Strata satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan. Semasa Kuliah Penulis Aktif di Organisasi Internal Kampus yaitu Ketua Bidan Keperempuanan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan 2016-2017.

